

LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

TAHUN ANGGARAN 2022



Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pimpinan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Perangkat Daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.
2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Laporan Operasional menunjukkan informasi Pendapatan-LO dan Beban.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit)-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan uraian tentang kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2022 ini masih belum

keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2022 ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bandung, 15 Mei 2023

PtL. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Hj. INDRASTUTI CHANDRA DEWI SUTRISNO, S.H., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 196804041998032002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan	vii
Laporan Realisasi Anggaran	viii
Neraca	ix
Laporan Operasional	x
Laporan Perubahan Ekuitas	xi
Catatan atas Laporan Keuangan	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi	2
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	6
2.1 Ekonomi Makro	6
2.2 Kebijakan Strategis	6
2.3 Kebijakan Keuangan	8
2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	9
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	11
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD	11

3.2	Ringkasan Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	15
3.3	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	16
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	17
4.1	Entitas Akuntansi	17
4.2	Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	18
4.3	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	19
4.4	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	19
4.5	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP	30
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	31
5.1	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	31
5.1.1	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	31
5.1.2	Penjelasan per Pos Laporan Realisasi Anggaran	33
5.1.3	Catatan Penting Lainnya	64
5.2	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	65
5.2.1	Penjelasan Umum Neraca	65
5.2.2	Penjelasan per Pos Neraca	65
5.2.3	Catatan Penting Lainnya	78
5.3	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	79
5.3.1	Penjelasan Umum Laporan Operasional	79
5.3.2	Penjelasan per Pos Laporan Operasional	80
5.3.3	Catatan Penting Lainnya	90
5.4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	91
5.4.1	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas ..	91

5.4.2	Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas	92
5.4.3	Catatan Penting Lainnya	94
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN PD	95
BAB VII	PENUTUP	97
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Rincian LRA
Lampiran	5	Daftar Beban Dibayar Dimuka
Lampiran	6	Daftar Persediaan
Lampiran	7	Daftar Saldo Persediaan
Lampiran	8	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran	9	Daftar Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran	10	Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Daerah
Lampiran	17	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Pegawai, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, Hibah, Bantuan Sosial, dan Lain-lain
Lampiran	18	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Persediaan
Lampiran	19	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Jasa
Lampiran	20	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Penyusutan
Lampiran	21	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neraca dan LRA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (LO); (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bandung, 15 Mei 2023

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Hj. INDRASTUTI CHANDRA DEWI SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 196804041998032002

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 189 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (*audited*). Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 *audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 *Audited* ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar atau sebesar persen dari yang dianggarkan sebesar Jumlah realisasi Pendapatan-LRA tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah-LRA.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar atau mencapai persen dari yang dianggarkan, Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar atau mencapai persen dari yang dianggarkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar atau mencapai persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp14.579.956.076,00 atau mencapai 93,92 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp15.524.617.441,00 . Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp14.148.701.251,00 atau 93,88 persen dari yang dianggarkan dan Belanja Modal sebesar Rp431.254.825,00 atau 95,02 persen dari yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA sebesar dan Belanja sebesar Rp14.579.956.076,00 diperoleh Surplus/(Defisit)-LRA sebesar .

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah) :

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)		Tahun Anggaran 2021 (Audited)	
	Anggaran Perubahan	Realisasi	Anggaran Perubahan	Realisasi
Pendapatan-LRA	0,00	0,00	0	0
Pendapatan Asli Daerah-LRA	0,00	0,00	0	0
Belanja	15.524.617.441,00	14.579.956.076,00	14.069.748.001,00	13.706.467.347,00
Belanja Operasi	15.070.748.941,00	14.148.701.251,00	14.069.748.001,00	13.536.740.347,00
Belanja Pegawai	9.816.136.003,00	9.112.666.305,00	8.772.972.937,00	8.578.280.467,00
Belanja Barang dan Jasa	5.254.612.938,00	5.036.034.946,00	5.296.775.064,00	4.958.459.880,00
Belanja Modal	453.868.500,00	431.254.825,00	177.235.002,00	169.727.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	453.868.500,00	431.254.825,00	177.235.002,00	169.727.000,00
Surplus/(Defisit)-LRA	(15.524.617.441,00)	(14.579.956.076,00)	-14.246.983.003,00)	(13.706.467.347,00)

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.817.879.566,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp5.381.695,00 , Aset Tetap sebesar Rp6.812.497.871,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00 . Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.664.279,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.616.353.504,68 .

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 dapat disajikan pada tabel berikut dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Aset Lancar	5.381.695,00	367.247.259,00
Aset Tetap	6.812.497.871,00	6.916.809.017,46
Aset Lainnya	0	0
Jumlah Aset	6.817.879.566,00	7.284.056.276,46
Kewajiban Jangka Pendek	5.664.279,00	4.433.784,00
Jumlah Kewajiban	5.664.279,00	4.433.784,00

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Ekuitas	6.812.215.287,00	7.279.622.492,46
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	6.817.879.566,00	7.284.056.276,46

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menunjukkan kinerja sesungguhnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam Tahun Anggaran 2022. Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 , Beban Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.681.778.472,00 , Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran Rp0,00 dan Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp14.681.778.472,00) .

Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Pendapatan-LO	0	0
Beban	14.681.778.472,00	14.513.762.983,57
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-14.681.778.472,00	-14.513.762.983,57
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0	0
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit)-LO	-14.681.778.472,00	-14.513.762.983,57

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.279.622.492,45 , Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp14.780.225.093,62) , RK PPKD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.579.956.076,00 , RA PPKD (Perolehan) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 , RA PPKD (Penyusutan) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 , Ekuitas Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp365.584.809,46), dan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.713.768.665,37 .

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Ekuitas Awal	7.279.622.492,45	7.709.199.050,02
Surplus/(Defisit)-LO	-14.681.778.472,00	-14.513.762.983,57
RK PPKD	14.579.956.076,00	14.071.536.426,00
RA PPKD (Perolehan)	0	25.300.000,00
RA PPKD (Penyusutan)	0	-12.650.000,00
Ekuitas	-365.584.809,46	0
Ekuitas Akhir	6.812.215.287,00	7.279.622.492,45

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Pendapatan – LRA, Belanja dan Pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Laporan Operasional yang terdiri dari Pendapatan – LO dan Beban; Neraca yang terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah.

Dalam CaLK ini diungkapkan juga kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 31-Dec-2022 Audited	%	Realisasi 31-Dec-2021 Audited
1	2	3	4	5 = 4/3*100	10
4	Pendapatan				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0
4.2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)	0,00	0,00	0,00	0
4.2.01.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sukan Pajak (SDA)	0,00	0,00	0,00	0
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	0
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	0,00	0,00	0
4.2.01.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0
4.2.02.02	Santunan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0
4.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0
4.3.03	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0
4	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0
5	Belanja				
5.1	Belanja Operasi	15.070.748.941,00	14.148.701.251,00	93,88	13.536.740.347,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.816.138.000,00	9.112.666.305,00	92,83	8.578.290.467,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.254.612.938,00	5.036.034.946,00	96,04	4.956.409.050,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Modal	453.898.500,00	431.254.825,00	95,02	169.727.000,00
5.2.01	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	453.898.500,00	431.254.825,00	95,02	169.727.000,00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Jalan Inpasi dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pajak ke Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jumlah Belanja	15.524.647.441,00	14.579.956.076,00	93,92	13.706.467.347,00
	BURPLUS / (DEFISIT) - LRA	(15.524.647.441,00)	(14.579.956.076,00)		(13.706.467.347,00)
6	Pembayaran				
6.1	Penerimaan Pembayaran				
6.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Pemungutan Anggaran (SLPA)	0,00	0,00	0,00	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0
6.1.04	Jumlah Penerimaan Pembayaran	0,00	0,00	0,00	0
6.2	Pengeluaran Pembayaran				
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0
6	Jumlah Pengeluaran Pembayaran	0,00	0,00	0,00	0
	Pembayaran Netto	0,00	0,00	0,00	0
	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (RL PA)	(15.524.647.441,00)	(14.579.956.076,00)		-13.706.467.347,00

Bandung, 15 Mei 2022
PIL KEPALADINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
FEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



N. INDOSARI/TICAMONDRA DEWI SUTRISNO, S.H., M.Si.
 MP. 13600404198002002

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022

No	Uraian	Ref	2021 (Audited)	2022 (Audited)
1	2	3	4	5
1.	ASET			
1.1	ASET LANCAR			
1.1.1	Kas di Bendahara Persewaan		0	0,00
1.1.2	Kas di Bendahara Pengelolaan Kas di BLUD		365.069.074,00	0,00
	Kas Lainnya		0	0,00
1.1.3	Pratang Pajak Daerah		0	0,00
1.1.4	Pratang Retribusi Daerah		0	0,00
1.1.5	Pratang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sekt		0	0,00
1.1.6	Pratang Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		0	0,00
1.1.7	Bagian Lancar Tagihan Pengisian Anggaran		0	0,00
1.1.8	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0	0,00
1.1.9	Bagian Lancar Pratang Sewa		0	0,00
1.1.10	Pratang Lain-lain		0	0,00
1.1.11	Penyediaan Pratang		0	0,00
	Penyediaan Pratang BLUD		0	0,00
1.1.12	Beban Dibayar Ditrunk		0	0,00
1.1.13	Persediaan		2.178.180,00	5.381.495,00
	Persediaan BLUD		0	0,00
	Jumlah Aset Lancar		367.247.254,00	5.381.495,00
1.2	ASET TETAP			
1.2.1	Tanah		8.138.640.000,00	8.138.640.000,00
1.2.2	Peralatan dan Mesin		7.150.432.548,03	7.685.017.174,00
1.2.3	Gedung dan Bangunan		5.354.291.535,61	5.354.291.538,00
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jembatan		67.202.000,00	87.202.000,00
1.2.5	Aset Tetap Lainnya		4,00	0,00
1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan		4,00	0,00
1.2.7	Akumulasi Penyusutan		-10.793.757.066,19	-11.432.752.841,00
	Jumlah Aset Tetap		6.916.809.017,45	6.813.497.871,00
1.3	ASET LAINNYA			
1.3.1	Tagihan Jangka Panjang		0	0
1.3.2	Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Anggaran		0	0
	Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0	0
1.3.3	Tagihan Bagian Jangka Panjang Pratang Sewa		0	0
1.3.4	Kontribusi dengan Pihak Ketiga		0	0
1.3.5	Aset Tidak Berwujud		0	0
1.3.6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0	0
1.3.7	Aset Lain-lain		0	0
1.3.8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		0	0
	Jumlah Aset Lainnya		0	0
	JUMLAH ASET		7.284.056.271,45	6.817.879.366,00
2	KEWAJIBAN			
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
2.1.1	Utang Perimbangan Pihak Ketiga (PPK)		0,00	0,00
2.1.2	Pendapatan Diterrima Daerah		0,00	0,00
2.1.3	Utang Daerah		4.433.784,00	5.664.279,00
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.433.784,00	5.664.279,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		4.433.784,00	5.664.279,00
3	EKUITAS		7.279.622.492,45	6.812.215.287,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.284.056.274,45	6.817.879.566,00

Bandung, 19 Mei 2023

PIK KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

M. NURMA PUTRI CHANDRA SUDIRAJATINDO, S.S., M.Si.
NIP. 198804011988032002

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022**

(Dalam Ribu)

NO	URAIAN	REF	TAHUN ANGGARAN 2021 (AUDITED)	TAHUN ANGGARAN 2022 (AUDITED)	KENAIKAN PENURUNAN	(%)
1.	2	3	4	5	10-(5-4)	11÷ (5/4)×100%
I	KEGIATAN OPERASIONAL					
I.1	PENDAPATAN	5.4.2.1				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.2.1.1				
	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.2.1.1.1	0	0	0	0,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.2.1.1.2	0	0	0	0,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	5.4.2.1.1.3	0	0	0	0,00
	Lain-lain PAD Yang sah	5.4.2.1.1.4	0	0	0	0,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		0	0	0	0,00
	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.2.1.2				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERimbangan	5.4.2.1.2.1				
	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.2.1.2.1.1	0	0	0	0,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.2.1.2.1.2	0	0	0	0,00
	Dana Alokasi Umum	5.4.2.1.2.1.3	0	0	0	0,00
	Dana Alokasi Khusus	5.4.2.1.2.1.4	0	0	0	0,00
	Dana Penyusutan	5.4.2.1.2.2	0	0	0	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		0	0	0	0,00
	TRANSFER ANTAR DAERAH	5.4.2.1.2.2				
	Rantuan Keuangan	5.4.2.1.2.2.1	0	0	0	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0	0	0	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer		0	0	0	0,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.2.1.3				
	Pendapatan Hibah	5.4.2.1.3.1	0	0	0	0,00
	Pendapatan Lainnya	5.4.2.1.3.2	0	0	0	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah		0	0	0	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		0	0	0	0,00
II	BEBAN					
II.1	BEBAN OPERASI	5.4.2.2				
	Beban Pegawai	5.4.2.2.1	8.578.280.467,00	9.112.566.325,00	534.385.858,00	6,23
	Beban Perawatan	5.4.2.2.2	446.925.229,00	550.229.311,00	103.304.082,00	23,11
	Beban Jasa	5.4.2.2.3	2.024.743.113,00	1.829.843.725,00	-414.999.378,00	-20,49
	Beban Pemeliharaan	5.4.2.2.4	384.901.147,00	412.727.172,00	27.826.025,00	7,23
	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.2.5	2.126.726.550,00	2.348.265.708,00	219.539.058,00	10,32
	Beban Bunga	5.4.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Subsidi	5.4.2.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Hibah	5.4.2.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.2.10	802.189.028,37	636.490.041,00	-165.709.287,37	-20,65
	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Transfer	5.4.2.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Lain-lain	5.4.2.2.13	0,00	11.568.200,00	11.568.200,00	0,00
	Jumlah Beban Operasi		14.513.762.983,37	14.681.778.472,00	168.015.488,43	1,16
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.2.3	-14.513.762.983,37	-14.681.778.472,00	-168.015.488,43	1,16
II.2	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2.4				
	SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.2.4.1				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0	0	0,00
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0	0	0,00
	Surplus dan Kekayaan Non Operasional Lainnya		0	0	0	0,00
	Jumlah Surplus Non Operasional		0	0	0	0,00
	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.2.4.2				
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0	0	0,00
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0	0	0,00
	Defisit dan Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0	0	0,00
	Jumlah Defisit Non Operasional		0	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.2.5	-14.513.762.983,37	-14.681.778.472,00	-168.015.488,43	1,16
III	POS LUAR BIASA	5.4.2.6				
III.1	PENDAPATAN LUAR BIASA					
	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
III.2	BEBAN LUAR BIASA					
	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	SURPLUS/DEFISIT LO	5.4.2.7	-14.513.762.983,37	-14.681.778.472,00	-168.015.488,43	1,16

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Bandung, 15 Mei 2023

PIL. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

H. INDRASTUTI CHANDRA DEWI SUTRISNO, S.H., M.Si
NIP. 196804041996032002

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022

URAIAN	AUDITED 2021	AUDITED 2022
EKUITAS AWAL	7.796.199.250,00	7.279.822.482,45
SURPLUS / (DEFISIT) -LO	-14.513.762.983,57	(14.981.770.472,00)
RK/PPKD	14.071.536.420,00	14.276.966.076,00
RK/SKPD	0,00	-
RA/PPKD (Nilai Penekanan)	26.300.000,00	-
RA/PPKD (Akumulasi Penyusutan)	-12.000.000,00	-
RA/SKPD (Nilai Penekanan)	0,00	-
RA/SKPD (Akumulasi Penyusutan)	0,00	-
EKUITAS	0,00	(361.964.809,46)
KOREKSI SALDO AWAL KAS	0,00	-
KAS LAINNYA (BLUD)	0,00	-
KOREKSI SETORAN KAS DI BENDAHWA PENERIMAAN TAHUN LALU	0,00	-
KOREKSI SETORAN KAS DI SP TAHUN LALU	0,00	(361.009.079,00)
KOREKSI PIUTANG	0,00	-
KOREKSI PENYISIHAN PIUTANG	0,00	-
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	0,00	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	-
KOREKSI INVESTASI PERMANEN	0,00	-
KOREKSI KEMITRAAN PIHAK KETIGA	0,00	-
KOREKSI BAGIAN LANCAR PIUTANG SEWA	0,00	-
KOREKSI BAGIAN LANCAR PIUTANG TPA	0,00	-
KOREKSI BAGIAN LANCAR PIUTANG TGR	0,00	-
KOREKSI DANA BERGOLUR	0,00	-
KOREKSI PENYISIHAN DANA BERGOLUR	0,00	-
KOREKSI PENCATATAN PENYERTAAN MODAL SAHABAH	0,00	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP	0,00	0,00
KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	0,00	(515.733,00)
KOREKSI SEUSUH REVALUASI ASET TETAP	0,00	-
KOREKSI NILAI ASET TAK BERWALID	0,00	-
KOREKSI NILAI ASET LAIN LAIN	0,00	-
KOREKSI AMORTISASI ASET TIDAK BERWALID	0,00	-
KOREKSI PENYUSUTAN ASET LAIN LAIN	0,00	-
KOREKSI KEMAJEMAN	0,00	-
KOREKSI UTANG BELANJA	0,00	-
KOREKSI LAIN LAIN PAD YANG SAH	0,00	-
KOREKSI KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00	-
KOREKSI SEBANYAK BARANG DAN JASA	0,00	-
KOREKSI NILAI EKSTRAKONTABEL	0,00	-
LAIN - LAIN	0,00	-
PEMBAYARAN PIUTANG BAGIAN LANCAR TGR	0,00	-
PEMBAYARAN PIUTANG LAIN LAIN	0,00	-
EKUITAS AKHIR	7.279.822.482,45	6.812.218.287,00

Bandung, 19 Mei 2023

PL KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

JL. DR. SOETOMO NO. 100, BANDUNG 40132, S.D., M.S.
HP. 08153331111



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Perangkat Daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Perangkat Daerah yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI

Domisili dan Bentuk Hukum Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas Berada

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan pada tanggal 22 November 2016 beralamat di Jalan Ciumbuleuit No. 2 Telepon (022) 2031044-2031045 Fax. 2031024 Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@Jabarprov.go.id Bandung – 40132.

Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan laporan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dengan beberapa modifikasi dan penambahan yang dianggap perlu untuk tujuan kelengkapan dalam pelaporan keuangan, sebagai berikut:

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Strategis, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Strategis
- 2.3 Kebijakan Keuangan
- 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD
- 3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi
- 4.2 Pendekatan penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.3.3 Catatan Penting Lainnya
- 5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - 5.3.4 Penjelasan Umum Neraca
 - 5.3.5 Penjelasan Per Pos Neraca
 - 5.3.6 Catatan Penting Lainnya
- 5.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional
 - 5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Operasional
 - 5.3.3 Catatan Penting Lainnya
- 5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.4.1 Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.4.2 Catatan Penting Lainnya

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan Perangkat Daerah

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Indikator makro yang mempengaruhi perumusan strategi dan penyusunan anggaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah sasaran, indikator sasaran, dan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat adalah meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	1
JUMLAH		12

2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima adalah perumusan perencanaan strategi. Dengan perumusan perencanaan strategi yang

dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.

Perencanaan strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Visi

Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

Misi

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

Visi dan Misi di atas diterjemahkan dalam beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di atas, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melaksanakan upaya sebagai-berikut :

1. Meningkatkan Penataan Data Kependudukan;
2. Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi dan Inovasi Pelayanan;
3. Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan;

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang bermanfaat bagi para pengguna laporan

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2.3 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sedangkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AKrual Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 155 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

2.4 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Di bawah ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 - 2023 :

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran IKU	Target Tahun ke -				
			1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat	81.12	81.83	82.63	83.47	84.28

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari Perencanaan Kinerja Tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses dalam memberikan perspektif mengenai hal yang diinginkan untuk dihasilkan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat akan lebih baik. Perjanjian Kinerja

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023, dan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET APBD

Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar atau persen dari yang dianggarkan sebesar . Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Pendapatan Transfer sebesar dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar .

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.
- b. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.
- c. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2022	%	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100\%$	6
1	Pendapatan Asli Daerah-LRA	0,00	0,00	0,00	0
2	Pendapatan Transfer – LRA	0,00	0,00	0,00	0
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2021, berarti realisasi Pendapatan-LRA Tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dibanding Tahun Anggaran 2021 .

Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.579.956.076,00 atau 93,92 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp15.524.617.441,00 .

Rincian Belanja Tahun Anggaran 2022 berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp14.148.701.251,00 atau 93,88 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp15.070.748.941,00 , terdiri dari:
 1. Belanja Pegawai sebesar Rp9.112.666.305,00 atau 92,83 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp9.816.136.003,00 .
 2. Belanja Barang dan jasa sebesar Rp5.036.034.946,00 atau 95,84 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp5.254.612.938,00 .
 3. Belanja Hibah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .
 4. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .
- b. Belanja Modal sebesar Rp431.254.825,00 atau 95,02 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp453.868.500,00 , terdiri dari:
 1. Belanja Tanah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .
 2. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp431.254.825,00 atau 95,02 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp453.868.500,00 .
 3. Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.
- d. Belanja Transfer sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2022	%	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%	6
1	Belanja Operasi	15.070.748.941,00	14.148.701.251,00	93,88	13.536.740.347,00
	- Belanja Pegawai	9.816.136.003,00	9.112.666.305,00	92,83	8.578.280.467,00
	- Belanja Barang & jasa	5.254.612.938,00	5.036.034.946,00	95,84	4.958.459.880,00
2	Belanja Modal	453.868.500,00	431.254.825,00	95,02	169.727.000,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin	453.868.500,00	431.254.825,00	95,02	169.727.000,00
3	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	15.524.617.441,00	14.579.956.076,00	0,00	13.706.467.347,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.706.467.347,00 , berarti realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 meningkat sebesar Rp873.488.729,00 atau 6,37 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Realisasi penyerapan belanja pada tahun 2022 belum optimal disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Sisa Belanja Pegawai sebesar Rp. 703,469,698 dikarenakan ada Jabatan Struktural dan JFT yang belum terisi sampai saat ini, termasuk staff yang pensiun sehingga Gaji TPP tidak terserap seluruhnya
2. Sisa Rp. 218,577,992 pada Belanja Barang & Jasa hasil Negosiasi dengan Penyedia.
3. Sisa Rp. 22,613,675 pada Belanja Modal hasil Negosiasi dengan Penyedia.

Surplus/(Defisit)-LRA

Surplus/(Defisit)-LRA Tahun Anggaran 2022 dihasilkan dari pengurangan antara Realisasi Pendapatan-LRA dan Realisasi Belanja, yaitu Surplus/(Defisit)-LRA sebesar -Rp. 14.148.701.251,00.

3.2 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pendapatan-LO

Realisasi Pendapatan-LO pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00 yang semuanya merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO, terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp0,00 .
- b. Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp0,00 .
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp0,00 .

Beban

Beban pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp232.403.078.319,14. Rincian berdasarkan jenis beban adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun Anggaran 2021 (<i>Audited</i>)
Beban Pegawai	9.112.666.305,00	8.578.280.467,00
Beban Persediaan	550.229.311,00	446.925.229,00
Beban Jasa	1.609.843.735,00	2.024.743.113,00
Beban Pemeliharaan	412.727.172,00	384.901.147,00
Beban Perjalanan Dinas	2.346.265.708,00	2.126.726.699,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	638.480.041,00	952.186.328,57
Beban Lain-lain	11.566.200,00	0,00
Jumlah	14.681.778.472,00	14.513.762.983,57

3.3 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITENTUKAN

Persentase Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar 0,00 persen.

Persentase Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar 93,92 persen. Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, hal ini disebabkan karena:

1. Efisiensi Anggaran, output sudah tercapai.
2. Terdapat sisa anggaran dari belanja yang tidak dapat dipergunakan.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil beserta jenjang struktural dibawahnya merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Untuk Tahun Anggaran 2022, entitas akuntansi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mencakup:

No	Bidang/Bagian/Satker	Jumlah Subbid/Subbag/Subsatker
1	Kepala Dinas	-
2	Sekretariat	2 Subbag
3	Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (FPAK)	-
4	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)	-
Jumlah Subbid/Subbag/Subsatker		2 Subbag

Sedangkan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang meliputi pencatatan barang milik daerah (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan akun laporan neraca dilakukan oleh Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu, yang mencakup:

No	Pengelola BMD	Jumlah
1	Kasubbag Umum/Pegawai	0 Orang
2	Pengurus Barang	1 Orang
3	Pengurus Barang Pembantu	0 Orang
Total		1 Orang

4.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan proses akuntansi yang menghasilkan data/laporan keuangan dari seluruh satuan kerja beserta jenjang struktural dibawahnya yang ada pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Laporan Keuangan yang disajikan dihasilkan melalui proses akuntansi keuangan dan proses pencatatan barang milik daerah.

Proses akuntansi dan pencatatan tersebut dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran seluruh unit kerja yang berada dibawah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan-LRA dan Belanja

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun neraca dari seluruh unit kerja yang berada dibawah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun Laporan Operasional dari seluruh unit kerja yang berada di bawah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Surplus dan Defisit-LO.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas seluruh unit kerja yang berada di bawah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil disusun menggunakan basis akrual untuk pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian yang berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan dari Kas Umum Daerah.

Sedangkan untuk pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas pada Laporan Realisasi Anggaran, yaitu diakui pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau di Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil atau saat kas dibayar dari Kas Umum Daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

4.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau SK PERANGKAT DAERAH atau entitas lain diluar pemerintah daerah atas

nama BUD. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas dicatat berdasarkan azas bruto tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan-LRA dinilai sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas Pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas Belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

(3) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai yang tertera pada dokumen pendukung pendapatan berdasarkan azas bruto. Pendapatan-LO dinilai sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan.

Dengan basis akrual, Pendapatan-LO diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan;

2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi berupa penerimaan kas di Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Umum Daerah maupun sumber daya ekonomi non kas yang diterima oleh entitas.

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan. Beban disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi.

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar.

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika (1) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, atau (2) berupa kas dan setara kas.

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar ini terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan, yaitu jumlah uang yang ditempatkan atau dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga (saham dan obligasi jangka pendek) diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi itu dinilai berdasarkan nilai wajar yaitu harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (deposito jangka pendek) diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengukuran **Piutang** dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Piutang dinilai sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih, dan penghapusan piutang. Piutang pada tanggal Neraca disajikan secara wajar sesuai dengan nilai piutang yang dapat ditagih (net realizable value). Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak.

Untuk menghasilkan nilai piutang secara wajar maka dilakukan **Penyisihan Piutang Tak Tertagih**. Pada akhir periode anggaran dilakukan analisis atas kemungkinan nilai piutang yang dapat ditagih maupun yang tidak dapat ditagih. Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang didasarkan pada umur piutang, dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, karena jenis piutang sangat bervariasi dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik piutang yang bersangkutan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penyisihan piutang yang

tidak dapat ditagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih menggunakan pendekatan neraca (balance sheet), yaitu dengan cara perhitungan daftar umur piutang (aging schedule). Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah

Pengukuran Persediaan adalah sebagai berikut:

- a. Harga perolehan jika Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction);
- d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan metoda Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau *First In First Out* (FIFO).

Persediaan biologis adalah persediaan yang mengalami pertumbuhan, seperti hewan dan tumbuhan. Pada saat perolehan pertama kali, aset biologis diukur dengan:

- a. Harga perolehan, atau
- b. Nilai wajar jika harga perolehan tidak tersedia.

Pada saat terjadi transformasi biologis, maka aset biologis akan diukur sebesar nilai wajar. Contohnya sapi yang melahirkan anak maka anak sapi tersebut diukur sebesar nilai wajar.

Persediaan biologis diukur setiap akhir periode akuntansi berdasarkan nilai wajar. Selisih nilai wajar akibat transformasi biologis akan diakui sebagai:

- a. Pendapatan non operasional, jika terjadi penambahan nilai wajar; dan
- b. Beban non operasional, jika terjadi pengurangan nilai wajar.

Nilai Wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Beban Dibayar Dimuka merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang merupakan klaim pihak tertentu yang pelunasannya dalam bentuk selain kas. Beban Dibayar Dimuka timbul akibat pembelian (belanja) barang/Jasa atau aktiva lain yang belum diterima atau belum sepenuhnya diterima oleh Pemda.

2. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar meliputi semua aset selain yang termasuk pada dua kriteria aset lancar. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset Non Lancar meliputi Investasi jangka panjang, Aset tetap, Dana Cadangan dan Aset lainnya.

1. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi non permanen dan investasi permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi Non Permanen meliputi:

- (1) pinjaman kepada perusahaan negara;
- (2) pinjaman kepada perusahaan daerah;
- (3) pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya;
- (4) investasi dalam surat utang negara;
- (5) investasi dalam proyek pembangunan;
- (6) investasi nonpermanen lainnya.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari penyertaan modal di perusahaan daerah dan di perusahaan negara.

Investasi Permanen dinilai menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penilaian investasi permanen dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan Metode biaya; Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

2. Aset Tetap

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;

- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap dilaporkan pada neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2022 berdasarkan harga perolehan dan/atau berdasarkan penilaian kembali oleh Tim Penertiban Aset BMD.

Aset Tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Apabila biaya perolehan aset tetap tidak tersedia, maka nilai aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Belanja Modal yang nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap, tidak disajikan sebagai aset tetap di Neraca, namun dicatat tersendiri sebagai *Extracomptable*.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Suatu pengeluaran dikapitalisasi menjadi aset tetap, jika memenuhi kriteria :

- a. Dibayarkan melalui mekanisme belanja modal;
- b. Jumlah pengeluaran minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit barang;
- c. Jumlah pengeluaran minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per grup;
- d. Aset yang diperoleh memenuhi kriteria aset tetap.

Aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan untuk menunjukkan penurunan nilai dan manfaatnya. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

3. Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Pembentukan Dana

Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa.

(i) *Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran* menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

(ii) *Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah*

menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

(iii) *Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa*

menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari sewa aset pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca. Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Aset Lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat berupa Pihak Ketiga-Sewa yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada

saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji, Bangun Guna Serah (BGS)/ *Build Operate Transfer* (BOT) yang dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut, atau Bangun Serah Guna (BGS)/ *Build Transfer Operate* (BTO) yang dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah dilakukan penyusutan dengan metode garis lurus. Masa manfaat dan nilai residu dipersamakan dengan masa manfaat dan nilai residu jenis aset yang sama di Aset Tetap

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Pemerintah Provinsi untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Aset nonkeuangan;
- b. Tidak berwujud;
- c. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Dapat diidentifikasi;
- g. Dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- h. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari dua belas bulan

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam *Aset Lain-lain*. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Di samping itu, piutang macet Perangkat Daerah yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional; perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah; kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya dan Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya; kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Belanja.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai *Kewajiban Jangka Panjang* jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/(defisit)-LO, SiLPA/SiKPA, serta penutupan saldo Perubahan SAL. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

4.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP ENTITAS AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas pos-pos Laporan Keuanganseluruhnya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar .Rp.0,00. Realisasi Pendapatan - LRA pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.0,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.0,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.0,00 dibanding Tahun Anggaran 2021.

Trend realisasi Pendapatan selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Trend Realisasi Pendapatan

Tahun Anggaran 2018 s.d 2022

Dalam Jutaan Rupiah



Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 14.579.956.076,00 atau 93,92 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar 15.524.617.441,00. Realisasi Belanja ini berasal dari Belanja Operasi sebesar 14.148.701.251,00, Belanja Modal sebesar 431.254.825,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.0,00, dan Belanja Transfer sebesar Rp.0,00.

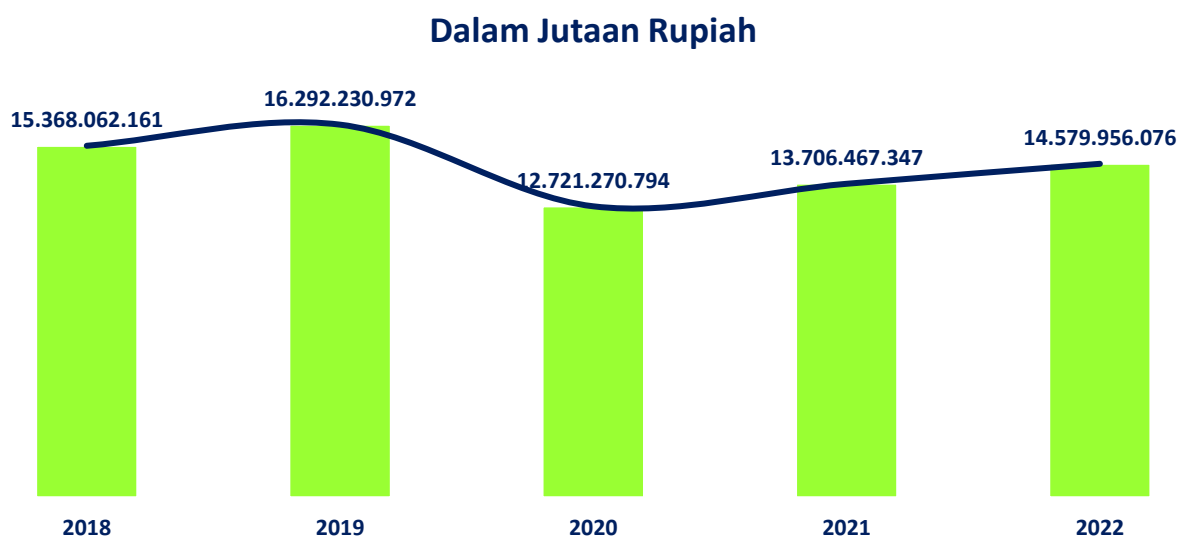
Belanja Operasi sebesar 14.148.701.251,00 atau 93,88 persen dari yang dianggarkan sebesar 15.070.748.941,00, terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar 9.112.666.305,00 atau 92,83 dari yang dianggarkan sebesar 9.816.136.003,00;
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar 5.036.034.946,00 atau persen 95,84 dari yang dianggarkan sebesar 5.254.612.938,00;

Belanja Modal sebesar 431.254.825,00 atau 95,02 persen dari yang dianggarkan sebesar 453.868.500,00, berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 431.254.825,00 atau 95,02 persen dari yang dianggarkan sebesar 453.868.500,00;

Trend realisasi Belanja selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Trend Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2018 s.d 2022



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 meningkat dibandingkan Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00 dan realisasi Belanja sebesar 14.579.956.076,00 maka terjadi Surplus/(Defisit)-LRA sebesar –Rp. 14.579.956.076,00.

5.1.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.2.1 Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp.0,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.0,00, berarti realisasi Pendapatan-LRA dibanding Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.0,00 atau 0,00 persen.

5.1.2.1.2.1.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.84.162.500,00 atau mencapai 83,22 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp.101.126.855,00.

Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2022	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (<i>Audited</i>)	%
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100\%$
1	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	101.126.855,00	84.162.500,00	83.22%
	Jumlah	101.126.855,00	84.162.500,00	83.22%

Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.582.512.145, berarti realisasi DAK Fisik – LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.-94,68% persen dibanding Tahun Anggaran 2022. Realisasi DAK Non Fisik – LRA Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini (dalam Rp) :

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (<i>Audited</i>)	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (<i>Audited</i>)	%
1	2	3	4	$5 = ((3-4)/4) \times 100\%$
1	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	84.162.500,00	1.582.512.145,00	-94,68%
	Jumlah			

5.1.2.2 Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 14.579.956.076,00 atau 93,92 persen dari yang dianggarkan sebesar 15.524.617.441,00.

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen pagu disebabkan beberapa hal diantaranya yang paling signifikan yaitu:

1. Sisa Belanja Pegawai sebesar Rp. 703.469.698,00 dikarenakan ada Jabatan Struktural dan

JFT yang belum terisi sampai saat ini, termasuk staff yang pensiun sehingga Gaji TPP tidak terserap seluruhnya.

2. Sisa Rp. 218.577.992,00 pada Belanja Barang & Jasa hasil Negosiasi dengan Penyedia.
3. Sisa Rp. 22.613.675,00 pada Belanja Modal hasil Negosiasi dengan Penyedia.

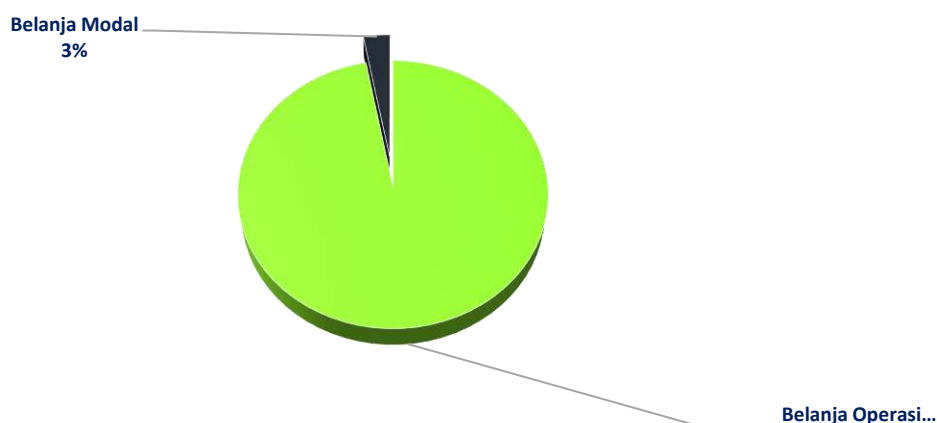
Realisasi Belanja sebesar 14.579.956.076,00 berasal dari Belanja Operasi sebesar 14.148.701.251,00, Belanja Modal sebesar 431.254.825,00, Belanja Tidak Terduga sebesar dan Belanja Transfer sebesar Rp.0,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar 13.706.467.347,00, berarti realisasi Belanja meningkat sebesar Rp873.488.729,00 atau 6,37 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Realisasi penyerapan Belanja pada Tahun Anggaran 2022 meningkat dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021, disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Meningkatnya pagu anggaran dibandingkan tahun sebelumnya;
2. Bertambahnya jumlah ASN dibanding tahun sebelumnya.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2022



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja berasal dari Belanja Operasi yaitu sebesar Rp. 14.148.701.251,00 atau 93,88 persen dari Total Belanja.

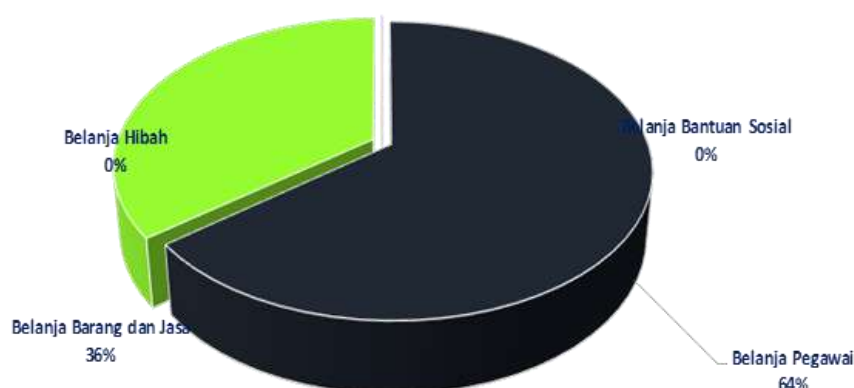
5.1.2.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 14.148.701.251,00 atau 93,88 persen dari yang dianggarkan sebesar 15.070.748.941,00. Realisasi Belanja Operasi ini berasal dari Belanja Pegawai sebesar 9.112.666.305,00, Belanja Barang dan jasa sebesar 5.036.034.946,00, Belanja Bunga sebesar 0,00, Belanja Subsidi sebesar 0,00, Belanja Hibah sebesar 0,00, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 0,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar 13.536.740.347,00, berarti realisasi Belanja Operasi meningkat sebesar Rp611.960.904,00 atau 4,52 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2022



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja Operasi berasal dari Belanja Pegawai yaitu sebesar 64,40 persen dari Total Belanja Operasi.

5.1.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar 9.112.666.305,00 atau 92,83 persen dari yang dianggarkan sebesar 9.816.136.003,00.

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan Sisa Belanja Pegawai

sebesar Rp. 703.469.698,00 dikarenakan ada Jabatan Struktural dan JFT yang belum terisi sampai saat ini, termasuk staff yang pensiun sehingga Gaji TPP tidak terserap seluruhnya.

Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2022	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.897.407.009,00	2.659.252.085,00	91,78
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.030.047.033,00	1.919.673.500,00	94,56
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	196.409.012,00	185.458.245,00	94,42
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	151.340.000,00	127.550.000,00	84,28
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	72.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	80.478.500,00	78.035.000,00	96,96
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	119.521.860,00	112.902.780,00	94,46
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.626.392,00	3.424.288,00	74,02
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	36.462,00	29.889,00	81,97
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	226.129.056,00	216.573.612,00	95,77
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.267.171,00	3.901.190,00	91,42
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.551.523,00	11.703.581,00	93,24
5.1.01.01.13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN			
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.736.821.230,00	6.320.814.431,00	93,82
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.536.821.230,00	6.223.094.431,00	95,20
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	200.000.000,00	97.720.000,00	48,86
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	181.907.764,00	132.599.789,00	72,89
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	181.907.764,00	132.599.789,00	72,89
	Jumlah	9.816.136.003,00	9.112.666.305,00	92,83

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar 8.578.280.467,00, berarti realisasi Belanja Pegawai meningkat sebesar Rp534.385.838,00 atau 6,23 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Realisasi belanja pegawai pada tahun 2022 meningkat sebesar 0,00 persen disebabkan beberapa hal yaitu bertambahnya jumlah ASN dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.659.252.085,00	2.776.934.724,00	-4,24
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.919.673.500,00	2.027.137.440,00	-5,30
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	185.458.245,00	203.246.414,00	-8,75
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	127.550.000,00	152.420.000,00	-16,32
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	793.000,00	-100,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	78.035.000,00	75.755.000,00	3,01
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	112.902.780,00	117.175.560,00	-3,65
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.424.288,00	4.273.273,00	-19,87
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.889,00	29.519,00	1,25
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	216.573.612,00	182.329.188,00	18,78
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.901.190,00	3.443.830,00	13,28
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.703.581,00	10.331.500,00	13,28
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN			
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.320.814.431,00	5.801.345.743,00	8,95
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.223.094.431,00	5.801.345.743,00	7,27
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	97.720.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	132.599.789,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	132.599.789,00	0,00	0,00
	Jumlah	9.112.666.305,00	8.578.280.467,00	6,23

5.1.1.1.1.1 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 sebesar 5.036.034.946,00 atau 95,84 persen dari yang dianggarkan sebesar 5.254.612.938,00.

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain adanya sisa Rp. 218,577,992 pada Belanja Barang & Jasa hasil Negosiasi dengan Penyedia.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2022	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.02.01	Belanja Barang	651.473.749,00	553.432.826,00	84,95
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	651.473.749,00	553.432.826,00	84,95
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.648.956.716,00	1.608.613.240,00	97,55
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.549.259.000,00	1.511.915.524,00	97,59
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	96.697.716,00	96.697.716,00	100,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	567.530.000,00	527.723.172,00	92,99
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	425.930.000,00	391.534.375,00	91,92
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	141.600.000,00	136.188.797,00	96,18
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.386.652.473,00	2.346.265.708,00	98,31
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.386.652.473,00	2.346.265.708,00	98,31
	Jumlah	5.254.612.938,00	5.036.034.946,00	95,84

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar 4.958.459.880,00, berarti realisasi Belanja Barang dan jasa meningkat sebesar Rp77.575.066,00 atau 1,56 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2022 tidak mengalami perubahan disebabkan pagu anggaran tahun 2022 dan 2021 hampir sama atau mendekati. Sehingga belanja disesuaikan dengan pagu yang ada.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = ((3-4)/4) x 100%
5.1.02.01	Belanja Barang	553.432.826,00	424.516.481,00	30,37
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	553.432.826,00	424.516.481,00	30,37
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.608.613.240,00	2.022.315.553,00	-20,46
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.511.915.524,00	1.930.690.873,00	-21,69
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	96.697.716,00	40.159.680,00	140,78
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	527.723.172,00	384.901.147,00	37,11
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	391.534.375,00	196.254.998,00	99,50
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	136.188.797,00	188.646.149,00	-27,81

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.346.265.708,00	2.126.726.699,00	10,32
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.346.265.708,00	2.126.726.699,00	10,32
Jumlah		5.036.034.946,00	4.958.459.880,00	1,56

5.1.1.1.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar 431.254.825,00 atau 95,02 persen dari yang dianggarkan sebesar 453.868.500,00.

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan yaitu adanya sisa anggaran sebesar Rp. 22,613,675 pada hasil pengadaan belanja modal yang tidak dapat dipergunakan kembali.

Realisasi Belanja Modal ini berasal dari Belanja Tanah sebesar 0,00, Belanja Peralatan dan Mesin sebesar 431.254.825,00, Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 0,00, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar 0,00, Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar 0,00.

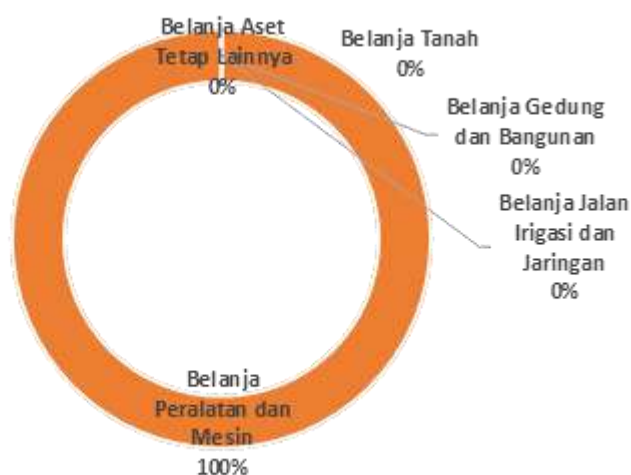
Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar 169.727.000,00, berarti realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 meningkat sebesar Rp261.527.825,00 atau 154,09 persen.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 meningkat disebabkan meningkatnya belanja peralatan dan mesin yang terdiri dari belanja modal pompa, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film, Belanja Modal Peralatan Cetak, Belanja Modal Personal Computer, Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, Belanja Modal Peralatan Personal Computer dan Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Modal

Tahun Anggaran 2022



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja Modal berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebesar 86 persen dari Total Belanja Modal.

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar 431.254.825,00 atau 95,02 persen dari yang dianggarkan sebesar 453.868.500,00.

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan terdapatnya sisa anggaran dari hasil pengadaan belanja modal yang tidak dapat dipergunakan kembali.

Rincian realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2022	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	7.260.000,00	7.200.000,00	99,17
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	7.260.000,00	7.200.000,00	99,17
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.125.000,00	16.576.740,00	91,46
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.125.000,00	16.576.740,00	91,46
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	183.675.500,00	173.445.542,00	94,43
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	183.675.500,00	173.445.542,00	94,43
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	234.808.000,00	224.032.543,00	95,41
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	210.000.000,00	199.392.543,00	94,95

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2022	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100\%$
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	24.808.000,00	24.640.000,00	99,32
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Jumlah		453.868.500,00	431.254.825,00	95,02

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 sebesar 169.727.000,00, berarti realisasi Belanja Peralatan dan Mesin meningkat sebesar Rp261.527.825,00 atau 154,09 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Hal ini disebabkan oleh meningkatnya belanja peralatan dan mesin yang terdiri dari belanja modal pompa, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film, Belanja Modal Peralatan Cetak, Belanja Modal Personal Computer, Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, Belanja Modal Peralatan Personal Computer dan Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)	%
1	2	3	4	$5 = ((3-4)/4) \times 100\%$
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	7.200.000,00	35.000.000,00	-79,43
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	7.200.000,00	35.000.000,00	-79,43
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.576.740,00	58.475.000,00	-71,65
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	17.270.000,00	-100,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	16.576.740,00	41.205.000,00	-59,77
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	173.445.542,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	173.445.542,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	224.032.543,00	76.252.000,00	193,81
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	199.392.543,00	48.400.000,00	311,97
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	24.640.000,00	27.852.000,00	-11,53
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		431.254.825,00	169.727.000,00	154,09

5.1.2.2.5 Surplus/(Defisit) – LRA

Berdasarkan realisasi Pendapatan – LRA dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) - LRA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar –Rp.14.579.956.076,00, dengan perhitungan sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Pendapatan – LRA	0,00	0
Belanja - LRA	14.579.956.076,00	13.706.467.347,00
Surplus/ (Defisit) – LRA	(14.579.956.076,00)	(13.706.467.347,00)

5.1.2.5 Perhitungan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar - 14.579.956.076,00. Perhitungan Anggaran diperoleh dari selisih antara anggaran dengan realisasinya. Jumlah keseluruhan selisih merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Rincian realisasi Perhitungan Anggaran adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Kekurangan Pendapatan/Pelampauan – LRA	0,00	0
Penghematan Belanja	(944.661.365,00)	(533.007.654)
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	(14.579.956.076,00)	(13.706.467.347)

5.1.2.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar - 14.579.956.076,00. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh dari selisih realisasi Pendapatan – LRA, Belanja, dan Pembiayaan Netto tahun berkenaan. Jumlah keseluruhan selisih realisasi merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Berdasarkan Defisit–LRA sebesar , Realisasi Pembiayaan Netto sebesar , maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar -14.579.956.076,00, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Pendapatan – LRA	0,00	0
Belanja - LRA	14.579.956.076,00	13.706.467.347,00
Surplus / (Defisit) – LRA	(14.579.956.076,00)	(13.706.467.347,00)
Pembiayaan Netto	0,00	0
SILPA	(14.579.956.076,00)	-13.706.467.347,00

Dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. - 13.706.467.347.

CATATAN PENTING LAINNYA

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

5.2.1 PENJELASAN UMUM NERACA

Ringkasan Komposisi Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022 (Unrevisi)	31 Desember 2021 (Audited)
Aset Lancar	5.381.695	367.247.259
Aset Tetap	6.714.566.980	6.916.809.017
Aset Lainnya	0	0
Jumlah Aset	6.719.948.675	7.284.056.276
Kewajiban Jangka Pendek	5.664.279	4.433.784
Jumlah Kewajiban	5.664.279	4.433.784
Ekuitas	6.714.284.396	7.279.622.492
Jumlah Ekuitas	6.714.284.396	7.279.622.492
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	6.719.948.675	7.284.056.276

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.719.948.674,83 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp5.381.695,00 , Aset Tetap sebesar Rp6.714.566.979,83 dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00 .

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.664.279,00 seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.714.284.395,83 .

5.2.2 PENJELASAN PER POS NERACA

5.2.2.1 Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.381.695,00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp367.247.259,00 . Hal ini berarti asset lancer menurun sebesar -Rp361.865.564,00 atau -98,53 persen.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Jenis Aset Lancar	31 Desember 2022 (Unrevisi)	31 Desember 2021 (Audited)
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	365.069.079
Kas di BLUD	0	0
Kas Lainnya	0	0
Piutang Pajak Daerah	0	0
Piutang Retribusi Daerah	0	0

Jenis Aset Lancar	31 Desember 2022 (Unreviu)	31 Desember 2021 (Audited)
Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0	0
Piutang Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0
Bagian Lancar Piutang Sewa	0	0
Piutang Lain-lain	0	0
Penyisihan Piutang	0	0
Penyisihan Piutang BLUD	0	0
Beban Dibayar Dimuka	0	0
Persediaan	5.381.695	2.178.180
Persediaan BLUD	0	0
Jumlah	5.381.695	367.247.259

5.2.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP)/ uang kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah atau Jasa Giro yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah atau Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara/Daerah atau Kewajiban yang belum dibayarkan per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp365.069.079,00 .

Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022 (Unreviu)	31 Desember 2021 (Audited)
Kas Uang Tunai	0	0
Kas di Bank	0	365.069.079
Lain-lain	0	0
Jumlah	0	365.069.079

5.2.2.1.2 Persediaan

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.381.695,00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.178.180,00 . Hal ini berarti persediaan meningkat sebesar Rp3.203.515,00 atau 147,07 persen.

Rincian Persediaan terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022 (Unreviu)	31 Desember 2021 (Audited)
Barang/perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah	5.381.695	2.178.180
Bahan/perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi	0	
Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	
Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah	0	
Jumlah	5.381.695	

Rincian Persediaan berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

NO	JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2022 (Unreviu)	31 Desember 2021 (Audited)
	BARANG PAKAI HABIS	5.381.695	2.178.180
	BAHAN	1.920.000	0
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	1.920.000	0
2	Bahan Kimia	0	0
3	Bahan Peledak	0	0
4	Bahan Bakar Dan Pelumas	0	0
5	Bahan Baku	0	0
6	Bahan Kimia Nuklir	0	0
7	Barang Dalam Proses	0	0
8	Bahan/Bibit Tanaman	0	0
9	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0	0
10	Isi Tabung Gas	0	0
11	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0	0
12	Bahan Lainnya	0	0
	SUKU CADANG	0	0
1	Suku Cadang Alat Angkutan	0	0
2	Suku Cadang Alat Besar	0	0
3	Suku Cadang Alat Kedokteran	0	0
4	Suku Cadang Alat Laboratorium	0	0
5	Suku Cadang Alat Pemancar	0	0
6	Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi	0	0
7	Suku Cadang Alat Pertanian	0	0
8	Suku Cadang Alat Bengkel	0	0
9	Suku Cadang Alat Persenjataan	0	0

NO	JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2022 (Unreviu)	31 Desember 2021 (Audited)
10	Persediaan Dari Belanja Bantuan Sosial	0	0
11	Suku Cadang Lainnya	0	0
	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	3.461.695	2.178.180
1	Alat Tulis Kantor	0	54.780
2	Kertas Dan Cover	0	0
3	Bahan Cetak	0	187.400
4	Benda Pos	0	0
5	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0	0
6	Bahan Komputer	0	0
7	Perabot Kantor	0	0
8	Alat Listrik	3.461.695	0
9	Perlengkapan Dinas	0	0
10	Kaporlap Dan Perlengkapan Satwa	0	0
11	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0	0
12	Suvenir/Cendera Mata	0	1.936.000
13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0
	OBAT-OBATAN	0	0
1	Obat	0	0
2	Obat-Obatan Lainnya	0	0
	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	0	0
1	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0
2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0	0
	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	0	0
1	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0	0
2	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	0	0
	NATURA DAN PAKAN	0	0
1	Natura	0	0
2	Pakan	0	0
3	Natura Dan Pakan Lainnya	0	0
	PERSEDIAAN PENELITIAN	0	0
1	Persediaan Penelitian Biologi	0	0
2	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0	0
3	Persediaan Penelitian Teknologi	0	0
4	Persediaan Penelitian Lainnya	0	0
	PERSEDIAAN DALAM PROSES	0	0
1	Persediaan Dalam Proses	0	0
2	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0	0

NO	JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2022 (Unreviu)	31 Desember 2021 (Audited)
	BARANG TAK HABIS PAKAI	0	0
	KOMPONEN	0	0
1	Komponen Jembatan Baja	0	0
2	Komponen Jembatan Pratekan	0	0
3	Komponen Peralatan	0	0
4	Komponen Rambu-Rambu	0	0
5	Attachment	0	0
6	Komponen Lainnya	0	0
	P I P A	0	0
1	Pipa Air Besi Tuang (Dci)	0	0
2	Pipa Asbes Semen (Acp)	0	0
3	Pipa Baja	0	0
4	Pipa Beton Pratekan	0	0
5	Pipa Fiber Glass	0	0
6	Pipa Plastik Pvc (Upvc)	0	0
7	P I P A Lainnya	0	0
	BARANG BEKAS DIPAKAI	0	0
	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS	0	0
1	Komponen Bekas	0	0
2	Pipa Bekas	0	0
3	Komponen Bekas Dan Pipa Bekas Lainnya	0	0
	BELANJA MODAL YANG MENJADI PERSEDIAAN		
	Aset Biologis		
1	Hewan		
2	Biota Laut		
3	Tanaman		
4	Aset Biologis Lainnya		
	Persediaan Hasil Produksi		
	JUMLAH PERSEDIAAN	5.381.695	2.178.180

Rekap persediaan menurut jenisnya yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2022 (Unreviu)	31 Desember 2021 (Audited)
1.	Barang Pakai Habis	5.381.695	2.178.180
	- Bahan	1.920.000	0
	- Suku Cadang	0	0
	- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.461.695	2.178.180
	- Obat-Obatan	0	0
	- Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	0	0
	- Persediaan Untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-Jaga	0	0
	- Natura Dan Pakan	0	0
	- Persediaan Penelitian	0	0
	- Persediaan Dalam Proses	0	0
2.	Barang Tak Habis Pakai	0	0
	- Komponen	0	0

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2022 (Unreviu)	31 Desember 2021 (Audited)
	- PIPA	0	0
3.	Barang Bekas Dipakai	0	0
	- Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0	0
	Jumlah	5.381.695	2.178.180

5.2.2.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.714.566.979,83 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.916.809.017,45 . Hal ini berarti Aset Tetap menurun sebesar - Rp202.242.037,62 atau -2,92 persen.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.714.566.979,83 dan Rp6.916.809.017,45 merupakan gabungan nilai aset tetap yang ada di perangkat daerah dan dikurang dengan akumulasi penyusutan.

Rincian Aset Tetap terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022 (Unreviu)	31 Desember 2021 (Audited)
Tanah	5.138.640.000	5.138.640.000
Peralatan dan Mesin	7.581.687.373	7.150.432.548
Gedung dan Bangunan	5.354.291.536	5.354.291.536
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	67.202.000	67.202.000
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan	-11.427.253.929	-10.793.757.066
Jumlah	6.714.566.980	6.916.809.017

5.2.2.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.138.640.000,00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.138.640.000,00 . Hal ini berarti jumlah asset tetap Tanah tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

5.2.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.581.687.373,03 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.150.432.548,03 . Hal ini berarti jumlah asset tetap Peralatan dan Mesin meningkat sebesar Rp431.254.825,00 atau 6,03 persen.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2021	Saldo Awal 2022	Mutasi		Saldo Akhir 2022
				Tambah	Kurang	
1	Alat Besar	35.000.000	35.000.000			35.000.000

No	Jenis	Saldo Akhir 2021	Saldo Awal 2022	Mutasi		Saldo Akhir 2022
				Tambah	Kurang	
1.1	Alat Besar Darat					
1.2	Alat Bantu	35.000.000	35.000.000			35.000.000
2	Alat Angkutan	25.300.000	25.300.000			25.300.000
2.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	25.300.000	25.300.000			25.300.000
2.2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur					
3.1	Alat Bengkel Bermesin					
3.2	Alat Bengkel Tak Bermesin					
3.3	Alat Ukur					
4	Alat Pertanian					
4.1	Alat Pengolahan					
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	58.475.000	58.475.000			140.726.740
5.1	Alat Kantor.	17.270.000	17.270.000			17.270.000
5.2	Alat Rumah Tangga	41.205.000	41.205.000	23.776.740		64.981.740
.3	Meubelair					
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar					100.876.500
6.1	Alat Studio.			100.876.500		100.876.500
6.2	Alat Komunikasi					
6.3	Peralatan Pemancar					
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan					
7.1	Alat Kedokteran.					
7.2	Alat Kesehatan Umum					
8	Alat Per-senjataan					
8.1	Persenjataan Non Senjata Api					
9	Komputer	76.252.000	76.252.000			449.105.585
9.2	Komputer Unit	48.400.000	48.400.000	199.392.543		247.792.543
9.2	Peralatan Komputer	27.852.000	27.852.000	97.209.042		125.061.042
10	Rambu - Rambu					
10.1	Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat					
11	Peralatan Olah Raga					10.000.000
11.1	Peralatan Olah Raga.			10.000.000		10.000.000
Jumlah		7.150.432.548,03	7.150.432.548,03	431.254.825		7.581.687.373,03

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Saldo Awal	7.150.432.548,03
Penambahan:	
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin (*)	431.254.825,00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	

Pengembangan (Kapitalisasi)	
Koreksi Pencatatan	
Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Masuk)	
Reklasifikasi dari Jenis Persediaan (Reklasifikasi Masuk)	
Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah	
Aset Tetap dari BTT	
Jumlah Penambahan	431.254.825,00
Pengurangan:	
Penghapusan	
Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)	
Koreksi Pencatatan	
Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	
Reklasifikasi ke Persediaan (Reklasifikasi Keluar)	
Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah	
Hibah/Mutasi Keluar Aset Tetap dari BTT	
Jumlah Pengurangan	0,00
Jumlah Per 31 Des 2022	7.581.687.373,03

(*) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp431.254.825,00 berasal dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun 2022 Anggaran adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kodering	Uraian	31 Desember 2022
5.2.02	BM Peralatan dan Mesin	431.254.825,00
Jumlah Belanja		431.254.825,00

- 2) Ditambah Realisasi Belanja Modal selain Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun Anggaran 2022 yang menjadi BM Peralatan dan Mesin, yaitu berasal dari (dalam rupiah):

Kodering	Uraian	31 Desember 2022
5.2.01	BM Tanah	
5.2.03	BM Gedung dan Bangunan	
5.2.04	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5.2.05	BM Aset Tetap Lainnya	
5.2.06	BM Aset Lainnya	
Jumlah Belanja		

- 3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal PM pada LRA Tahun Anggaran 2022 yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .
- 4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun Anggaran 2022 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu menjadi (dalam rupiah)

Kodering	Uraian	31 Desember 2021
5.2.3	BM Tanah	
5.2.3	BM Gedung dan Bangunan	

Kodering	Uraian	31 Desember 2021
5.2.3	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5.2.3	BM Aset Tetap Lainnya	
5.2.3	BM Aset Lainnya	
5.2.3	Persediaan	
5.2.3	Aset Tak Berwujud	
Jumlah Belanja		

- 5) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .
- 6) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,00 .

5.2.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.354.291.535,61 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.354.291.535,61 . Hal ini berarti Gedung dan Bangunan tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2021	Saldo Awal 2022	Mutasi		Saldo Akhir 2022
				Tambah	Kurang	
1	Gedung Kantor	5.354.291.535,61	5.354.291.535,61	0,00	0,00	5.354.291.535,61
Jumlah		5.354.291.535,61	5.354.291.535,61	0,00	0,00	5.354.291.535,61

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Saldo Awal	5.354.291.535,61
Penambahan:	
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan (*)	
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	
Pengembangan (Kapitalisasi)	
Koreksi Pencatatan	
Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Masuk)	
Reklasifikasi dari Jenis Persediaan (Reklasifikasi Masuk)	
Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah	
Aset Tetap dari BTT	
Jumlah Penambahan	0,00
Pengurangan:	
Penghapusan	
Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)	
Koreksi Pencatatan	
Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	
Reklasifikasi ke Persediaan (Reklasifikasi Keluar)	
Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah	
Hibah/Mutasi Keluar Aset Tetap dari BTT	
Jumlah Pengurangan	0,00
Jumlah Per 31 Des 2022	5.354.291.535,61

(*) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sebesar Rp0,00 berasal dari:

1) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kodering	Uraian	31 Desember 2022
5.2.3	BM Gedung dan Bangunan	0,00
Jumlah Belanja		0,00

2) Ditambah Realisasi Belanja Modal selain Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2022 yang menjadi BM Gedung dan Bangunan, yaitu berasal dari (dalam rupiah):

Kodering	Uraian	31 Desember 2022
5.2.3	BM Tanah	0
5.2.3	BM Peralatan dan Mesnin	0
5.2.3	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
5.2.3	BM Aset Tetap Lainnya	0
5.2.3	BM Aset Lainnya	0
Jumlah Belanja		

3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2022 yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .

4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2022 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu menjadi (dalam rupiah):

Kodering	Uraian	31 Desember 2022
5.2.3	BM Tanah	0
5.2.3	BM Peralatan dan Mesnin	0
5.2.3	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
5.2.3	BM Aset Tetap Lainnya	0
5.2.3	BM Aset Lainnya	0
5.2.3	Persediaan	0
5.2.3	Aset Tak Berwujud	0
Jumlah Belanja		

5) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .

6) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00 .

Penambahan Gedung dan Bangunan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp0,00 .

5.2.2.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp67.202.000,00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp67.202.000,00 .

Hal ini berarti nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak mengalami perubahan sebesar 0,00 persen dibandingkan tahun 2021.

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2021	Saldo Awal 2022	Mutasi		Saldo Akhir 2022
				Tambah	Kurang	
1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.202.000,00	67.202.000,00	0,00	0,00	67.202.000,00
Jumlah		67.202.000,00	67.202.000,00	0,00	0,00	67.202.000,00

5.2.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 .

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2021	Saldo Awal 2022	Mutasi		Saldo Akhir 2022
				Tambah	Kurang	
1	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.2.2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 .

Rincian mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah) :

No	Jenis	Saldo Akhir 2021	Saldo Awal 2022	Mutasi		Saldo Akhir 2022
				Tambah	Kurang	
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0

5.2.2.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan jumlah total akumulasi penyusutan dari Aset Tetap, yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya. Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 sebesar (Rp11.427.253.928,81) sedangkan Per 31 Desember 2021 sebesar (Rp10.793.757.066,19). Hal ini Akumulasi Penyusutan berarti menurun sebesar - Rp633.496.862,62 atau 5,87 persen.

Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 sebesar (Rp11.427.253.928,81) dari Total Aset Tetap Tahun 2022 sebesar Rp6.714.566.979,83 .

Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022 (Unreviu)	31 Desember 2021 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.443.784.184	5.867.700.592
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.952.112.145	4.898.058.974
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.357.600	27.997.500
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Jumlah	11.427.253.929	10.793.757.066

5.2.2.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 .

Aset Lainnya terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022 (Unreviu)	31 Desember 2021 (Audited)
Tagihan Jangka Panjang	0	0
Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0
Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	0	0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0	0
Aset Lain-Lain	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0	0
Jumlah	0	0

5.2.2.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 .ss

Rincian Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022 (Unreviu)	31 Desember 2021 (Audited)
Software	0	0
ISO	0	0
Lain-Lain	0	0
Jumlah	0	0

5.2.2.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.3.3 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 .

Aset Lain-lain terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022 (Unreviu)	31 Desember 2021 (Audited)
Aset Tetap yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan, disebabkan dalam kondisi rusak berat dan tidak layak untuk dipergunakan (DIURAI JENIS ASETNYA)	0	0
Aset Tetap dalam Pengajuan Penghapusan	0	0
Piutang Dalam Proses Penghapusan	0	0
Jumlah	0	0

5.2.2.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.4 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.664.279,00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.433.784,00 . Hal ini berarti meningkat sebesar Rp1.230.495,00 atau 27,75 persen. Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.664.279,00 seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.2.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.664.279,00 ,sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.433.784,00 . Hal ini berarti kewajiban jangka pendek meningkat sebesar Rp1.230.495,00 atau 27,75 persen.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022 (Unreviu)	31 Desember 2020 (Audited)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
Utang Belanja	5.664.279	4.433.784
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
Jumlah	5.664.279	4.433.784

5.2.2.4.1 Utang Belanja

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.664.279,00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.433.784,00 . Hal ini berarti utang belanja meningkat sebesar Rp1.230.495,00 atau 27,75 persen.

Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.664.279,00 tersebut merupakan belanja tagihan listrik.

5.2.2.5 Ekuitas

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.714.284.395,83 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.279.622.492,45 . Hal ini berarti ekuitas menurun sebesar -Rp565.338.096,62 atau -7,77 persen.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (disajikan dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022(Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Pendapatan-LO	0	0
Beban	14.780.225.094	14.513.762.984
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-14.780.225.094	-14.513.762.984
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0	0
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0
Pos Luar Biasa	0	0
Surplus/(Defisit)-LO	-14.780.225.094	-14.513.762.984

Jumlah Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 yang semuanya merupakan Pendapatan Asli Daerah-LO, terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp0,00 , Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp0,00 , dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp0,00 .

Jumlah Beban Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.780.225.093,62 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp9.112.666.305,00 , Beban Persediaan sebesar Rp550.229.311,00 , Beban Jasa sebesar Rp1.609.843.735,00 , Beban Pemeliharaan sebesar Rp527.723.172,00 , Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp2.346.265.708,00 , Beban Hibah sebesar Rp0,00 , Beban Bantuan Sosial sebesar Rp0,00 , Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp633.496.862,62 , Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp0,00 , Beban Transfer Rp0,00 dan Beban Lain-lain sebesar Rp0,00 . Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 terdiri dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 , dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 . Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 . Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp14.780.225.093,62) diperoleh dari Pendapatan-LO sebesar Rp0,00 dikurangi dengan Beban sebesar Rp14.780.225.093,62 ditambah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 .

5.3.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi

Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Pendapatan-LO	0	0
Pendapatan Asli Daerah-LO	0	0
Jumlah Pendapatan Transfer-LO	0	0
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	0	0

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 , realisasi Pendapatan-LO tidak mengalami perubahan dibanding Tahun Anggaran 2021 sebesar 0,00 persen.

5.3.2.2 Beban

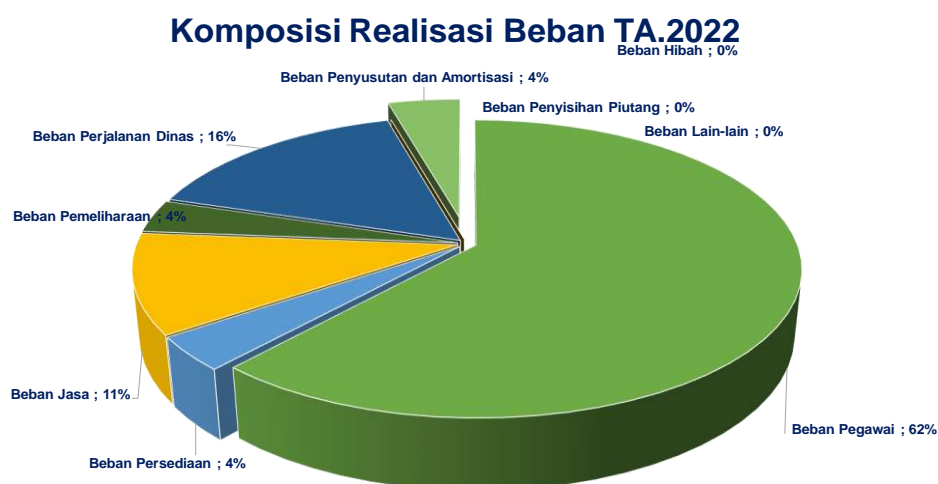
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Realisasi Beban Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp14.780.225.093,62 terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Beban Pegawai	9.112.666.305	8.578.280.467

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Beban Persediaan	550.229.311	446.925.229
Beban Jasa	1.609.843.735	2.024.743.113
Beban Pemeliharaan	527.723.172	384.901.147
Beban Perjalanan Dinas	2.346.265.708	2.126.726.699
Beban Dana Bagi Hasil Pajak	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	633.496.863	952.186.329
Beban Penyisihan Piutang	0	0
Beban Transfer	0	0
Beban Lain-lain	0	0
Jumlah	14.780.225.094	14.513.762.984

Berikut ini disajikan komposisi realisasi masing-masing jenis Beban terhadap realisasi total Beban:



5.3.2.2.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.112.666.305,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Beban pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.578.280.467,00 , maka realisasi beban pegawai meningkat sebesar Rp534.385.838,00 atau 6,23 persen.

Rincian Objek Beban Pegawai adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Beban Gaji dan Tunjangan	2.659.252.085	2.776.934.724
Beban Tambahan Penghasilan PNS	6.320.814.431	5.801.345.743
ambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	132.599.789	
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	-	- -
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	-	- -
Gaji dan Tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur	-	- -
Belanja Pegawai BLUD	-	- -
Jumlah	9.112.666.305	8.578.280.467

5.3.2.2.2 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp550.229.311,00 , Apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp446.925.229,00 , berarti realisasi Beban Persediaan sebesar meningkat sebesar Rp103.304.082,00 atau 23,11 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Rincian Objek Beban Persediaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Beban Barang Pakai Habis	550.229.311	446.925.229
Beban Barang Tak Habis Pakai	0	0
Beban Barang Bekas Dipakai	0	0
Beban Uang/Barang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0
Jumlah	550.229.311	446.925.229

5.3.2.2.3 Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.609.843.735,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.024.743.113,00 , berarti realisasi Beban Jasa menurun sebesar (Rp414.899.378,00) atau -20,49 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Rincian Objek Beban Jasa adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Beban Jasa Kantor	1.511.915.524	1.930.690.873
Beban Premi Asuransi	96.697.716	40.159.680
Beban Sewa Tanah	-	-
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	-	-
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	51.465.000
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-
Jumlah	1.609.843.735	2.024.743.113

5.3.2.2.4 Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp527.723.172,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp384.901.147,00 , berarti realisasi Beban Pemeliharaan meningkat sebesar Rp142.822.025,00 atau 37,11 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Rincian Objek Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Beban Pemeliharaan Tanah	-	- -
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	391.534.375	196.254.998
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	136.188.797	188.646.149
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	- -
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	- -
Beban Modal yang Tidak Dikapitalisasi yang merupakan Pemeliharaan	-	- -
Jumlah	527.723.172	384.901.147

5.3.2.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.346.265.708,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.126.726.699,00 , berarti realisasi Beban Perjalanan Dinas meningkat sebesar Rp219.539.009,00 atau 10,32 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Rincian realisasi Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.346.265.708	2.126.726.699
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	- -
Jumlah	2.346.265.708	2.126.726.699

5.3.2.2.6 Beban Subsidi

Realisasi Beban Subsidi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Subsidi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Beban Subsidi tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00persen disbanding Tahun Anggaran 2021.

Rincian Object Beban Subsidi adalah sebagai berikut (dalam rupiah) :

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Belanja Subsidi kepada BUMN	-	-
Belanja Subsidi kepada BUMD	-	-
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	-
Belanja Subsidi kepada Koperasi	-	-
Jumlah	-	-

5.3.2.2.7 Beban Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Beban Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Beban Dana Bagi Hasil Pajak tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Rincian Object Beban Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Belanja Dana Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Pusat	-	- -
Belanja Dana Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	- -
Belanja Dana Bagi Hasil Pajak kepada BUMN	-	- -
Belanja Dana Bagi Hasil Pajak kepada BUMD	-	- -

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Belanja Dana Bagi Hasil Pajak kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	- -
Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Dana BOS	-	- -
Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	- -
Jumlah	0	0

5.3.2.2.8 Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Beban Bantuan Sosial tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Rincian Objek Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	- -
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	- -
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	- -
Jumlah	0	0

5.3.2.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp633.496.862,62 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp952.186.328,57 , berarti realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi menurun sebesar (Rp318.689.465,95) atau -33,47persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
I	Beban Penyusutan		

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
1.	Peralatan dan Mesin	576.083.592	681.111.652
2.	Gedung dan Bangunan	54.053.171	267.714.577
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.360.100	3.360.100
4.	Aset Tetap Lainnya	0	0
5.	Aset Lain-Lain	0	0
	Jumlah Beban Penyusutan	633.496.863	952.186.329
II	Beban Amortisasi		
	Aset Tidak Berwujud	0	0
	Jumlah Beban Amortisasi	0	0
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	633.496.863	952.186.329

5.3.2.2.10 Beban Penyisihan Piutang

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Beban Penyisihan Piutang sebesar tidak mengalami perubahan atau persen.

Rincian Beban Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
I	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak	0	0
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	0	0
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang SAH	0	0
4.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	0	0
II	Beban Penyisihan Piutang Lainnya		
1.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0	0

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
2.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0	0
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	0	0
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	0	0

5.3.2.2.11 Beban Transfer

Realisasi Beban Transfer Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Beban Transfer tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00persen dari Tahun Anggaran 2021.

Rincian Objeck Beban Transfer adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	-	-
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	-	-
Jumlah	0	0

5.3.2.2.12 Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Beban Lain-lain tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

Rincian Objek Beban Lain-lain adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Aset Tetap Ekstrakomptabel		
Nilai Buku Aset Tetap Yang Dihapuskan	-	- -
Belanja Tidak Terduga	-	-
Jumlah	0	0

5.3.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Berdasarkan realisasi Pendapatan-LO dan realisasi Beban Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar (Rp14.780.225.093,62) dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Pendapatan-LO	0	0
Beban	14.780.225.094	14.513.762.984
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-14.780.225.094	-14.513.762.984

5.3.2.4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 berasal dari Surplus Non Operasional sebesar Rp0,00 dan Defisit Operasional sebesar Rp0,00 .

5.3.2.4.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari (dalam rupiah) :

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

5.3.2.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

5.3.2.3 Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa adalah penjumlahan antara Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional, dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional. Dari realisasi Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp14.780.225.093,62) dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 , maka realisasi Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar (Rp14.780.225.093,62).

5.3.2.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan akun untuk menyajikan pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Untuk Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat realisasi untuk Pos Luar Biasa.

5.3.2.5 Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO adalah penjumlahan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional, Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa. Realisasi Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp14.780.225.093,62), berasal dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Pendapatan-LO	0	0
Beban	14.780.225.094	14.513.762.984
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-14.780.225.094	-14.513.762.984
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0	0
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0
Pos Luar Biasa	0	0
Surplus/(Defisit)-LO	-14.780.225.094	-14.513.762.984

5.4.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**5.4.2 PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas Awal;
- b) Surplus/Defisit-LO pada Periode bersangkutan;
- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan
- d) Koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - (2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- e) Ekuitas Akhir

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (disajikan dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Ekuitas Awal	7.279.622.492	7.709.199.050
Surplus/(Defisit)-LO	-14.780.225.094	-14.513.762.984
RK PPKD	14.579.956.076	14.071.536.426
RA PPKD (Nilai Perolehan)	0	25.300.000
RA PPKD (Akumulasi Penyusutan)	0	-12.650.000
Ekuitas	-365.069.079	0
Ekuitas Akhir	6.714.284.396	7.279.622.492

Ekuitas Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.714.284.395,83 terdiri dari:

1. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.279.622.492,45 .
2. Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp14.780.225.093,62).
3. RK PPKD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.579.956.076,00 .

4. RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 .
5. RA PPKD (Akumulasi Penyusutan) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 .
6. Ekuitas Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp365.069.079,00).
7. Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.714.284.395,83 .

5.4.3 PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.3.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.279.622.492,45 . Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir dari Ekuitas Tahun Anggaran 2021 Audited.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.709.199.050,02 , berarti realisasi Ekuitas Awal menurun sebesar (Rp429.576.557,57) atau -5,57 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

5.4.3.2 Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp14.780.225.093,62). Akun ini dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/(Defisit)-LO.

Surplus/Defisit-LO Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp14.780.225.093,62). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp14.513.762.983,57). Hal ini berarti Apabila dibandingkan dengan Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 Surplus/(Defisit)-LO Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurun sebesar (Rp266.462.110,05) atau 1,84 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

5.4.3.3 RK PPKD

RK PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi kas antar entitas (PPKD dan OPD). RK PPKD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.579.956.076,00 .

5.4.3.4 RA PPKD

RA PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi aset tetap antar entitas (PPKD dan OPD).

Saldo RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun 2022 terdiri atas penerimaan/mutasi masuk barang dan pengeluaran/mutasi keluar barang sebesar Rp0,00 serta Saldo RA PPKD (Akumulasi Penyusutan) yang berupa nilai akumulasi penyusutan dari nilai aset tersebut sebesar Rp0,00

5.4.3.5 Ekuitas

Akun ekuitas menunjukkan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Koreksi Saldo Awal Kas		
Kas Lainnya (BLUD)		
Koreksi Setoran Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		
Koreksi Setoran Kas di BP Tahun Lalu	-365.069.079	
Koreksi Piutang		
Koreksi Penyisihan Piutang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Koreksi Nilai Persediaan		
Koreksi Investasi Permanen		
Koreksi Kemitraan Pihak Ketiga		
Koreksi Bagian Lancar Piutang Sewa		
Koreksi Bagian Lancar Piutang TPA		
Koreksi Bagian Lancar Piutang TGR		
Koreksi Dana Bergulir		
Koreksi Penyisihan Dana Bergulir		
Koreksi Pencatatan Penyertaan Modal Daerah		
Koreksi Nilai Aset Tetap		
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Koreksi Nilai Aset Tak Berwujud		
Koreksi Nilai Aset Lain-Lain		
Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Koreksi Penyusutan Aset Lain-Lain		

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Unreviu)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Koreksi Kewajiban		
Koreksi Utang Belanja		
Koreksi Lain-Lain PAD Yang Sah		
Koreksi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
Koreksi Beban Barang Dan Jasa		
Koreksi Nilai Ekstrakomtabel		
Lain - Lain		
Pembayaran Piutang Bagian Lancar TGR		
Pembayaran Piutang Lain-Lain		
Jumlah	-365.069.079	0

Koreksi ekuitas ini disebabkan oleh :

1. Terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada 31 Desember 2022 sebesar Rp. 365.069.079,00 yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Saldo Kas tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada 19 April 2022

5.4.3.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.714.284.395,83 . Nilai Ekuitas ini merupakan nilai yang disajikan sebagai akun Ekuitas di Neraca per 31 Desember 2022.

Hal ini Apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.279.622.492,45 , Ekuitas Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurun sebesar (Rp565.338.096,62) atau -7,77persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

-

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT

6.1 DOMISILI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 yang beralamat di Jalan Ciumbuleuit No. 2, Kota Bandung.

6.2 DASAR HUKUM LANDASAN OPERASIONAL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan operasionalnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

6.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 142 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

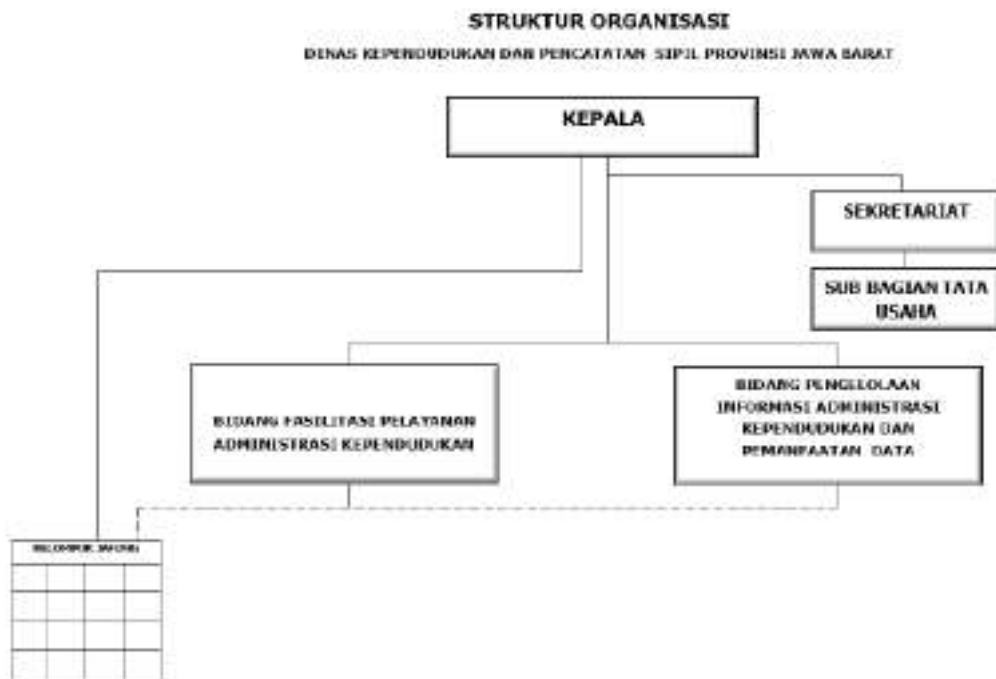
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

- b. penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

6.4 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat



BAB VII**PENUTUP**

Dari uraian diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2022 menunjukkan jumlah Aset sebesar Rp6.817.879.566,00 Kewajiban sebesar Rp5.664.279,00 dan Ekuitas sebesar Rp6.616.353.504,68 ;
2. Realisasi APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 menunjukkan Pendapatan-LRA berjumlah atau persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar dan Belanja berjumlah 14.579.956.076,00 atau 93,92 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 15.524.617.441,00. Dengan demikian, terdapat (Defisit)-LRA antara Pendapatan-LRA dan Belanja sebesar ;
3. Pada Laporan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp0,00 , Beban sebesar Rp168.015.488,43 dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 sehingga (Defisit)-LO sebesar (Rp168.015.488,43);
4. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.279.622.492,45 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp6.713.768.665,37 .

Bandung, 15 Mei 2023

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Hj. INDRASTUTI CHANDRA DEWI SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 196804041998032002

LAMPIRAN



PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

006 Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	
				5 = (4 / 3) * 100	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
9	BELANJA DAERAH	15.524.817.441,00	14.579.556.076,00	93,91	13.706.467.347,00
5.1	BELANJA OPERASI	15.070.748.941,00	14.148.701.251,00	93,88	13.136.740.347,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.816.136.003,00	9.113.686.305,00	92,81	8.179.260.467,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.817.407.005,00	2.659.252.085,00	94,38	2.776.934.704,00
5.1.01.01.0	Belanja Gaji Pokok ASN	2.030.047.033,00	1.919.673.500,00	94,56	2.027.177.440,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS	2.030.047.033,00	1.919.673.500,00	94,54	1.977.157.440,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	196.409.012,00	285.458.245,00	144,27	203.246.414,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	196.409.012,00	285.458.245,00	144,27	203.246.414,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	151.340.000,00	127.590.000,00	84,28	152.420.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	151.340.000,00	127.590.000,00	84,28	152.420.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	72.000.000,00	0,00	0,00	793.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	72.000.000,00	0,00	0,00	793.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	80.478.500,00	78.635.000,00	96,96	75.755.000,00
5.1.01.01.09	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	80.478.500,00	78.635.000,00	96,96	75.755.000,00
5.1.01.01.09.01	Belanja Tunjangan Beras ASN	119.521.860,00	112.901.780,00	94,46	117.175.560,00
5.1.01.01.09.02	Belanja Tunjangan Beras PNS	119.521.860,00	112.901.780,00	94,46	117.175.560,00
5.1.01.01.09.03	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.426.202,00	3.424.288,00	77,01	4.273.273,00
5.1.01.01.09.04	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.426.202,00	3.424.288,00	77,01	4.273.273,00
5.1.01.01.09.05	Belanja Pemuliharaan Gaji ASN	36.462,00	29.685,00	81,47	29.519,00
5.1.01.01.09.06	Belanja Pemuliharaan Gaji PNS	36.462,00	29.685,00	81,47	29.519,00
5.1.01.01.09.07	Belanja Juran Jaminan Kesehatan ASN	226.129.856,00	216.573.612,00	95,77	182.329.188,00
5.1.01.01.09.08	Belanja Juran Jaminan Kesehatan PNS	226.129.856,00	216.573.612,00	95,77	182.329.188,00
5.1.01.01.09.09	Belanja Juran Jaminan Kesehatan Kerja ASN	4.267.171,00	3.901.180,00	91,42	3.483.800,00
5.1.01.01.09.10	Belanja Juran Jaminan Kesehatan Kerja PNS	4.267.171,00	3.901.180,00	91,42	3.483.800,00
5.1.01.01.09.11	Belanja Juran Jaminan Kesehatan ASN	12.551.523,00	11.703.581,00	93,24	10.331.100,00
5.1.01.01.09.12	Belanja Juran Jaminan Kesehatan PNS	12.551.523,00	11.703.581,00	93,24	10.331.100,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.736.821.130,00	6.320.314.431,00	93,82	5.801.345.743,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Sebutan Kerja ASN	6.536.821.130,00	6.225.394.431,00	95,23	5.801.345.743,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Sebutan Kerja PNS	6.536.821.130,00	6.225.394.431,00	95,23	5.801.345.743,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	200.000.000,00	97.720.000,00	48,86	0,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	200.000.000,00	97.720.000,00	48,86	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif	181.907.764,00	132.598.789,00	72,89	0,00
5.1.01.03.01	Belanja Honorarium	181.907.764,00	132.598.789,00	72,89	0,00
5.1.01.03.02	Belanja Honorarium Penanggungjawab Penelitian Keuangan	181.907.764,00	132.598.789,00	72,89	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.254.613.938,00	5.076.934.446,00	96,84	4.958.459.880,00
5.1.02.01	Belanja Barang	651.473.749,00	553.432.826,00	84,95	424.516.481,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Hadiah	651.473.749,00	553.432.826,00	84,95	424.516.481,00
5.1.02.01.02	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.709.150,00	3.894.150,00	35,84	16.771.830,00
5.1.02.01.03	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	84.867.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	130.000.000,00	128.922.000,00	99,17	74.100.000,00
5.1.02.01.05	Belanja Bahan-Bahan Lemris	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.06	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	44.452.113,00	38.941.998,00	87,37	156.508.670,00
5.1.02.01.07	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	140.239.136,00	111.409.592,00	79,44	34.512.346,00
5.1.02.01.08	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos	2.750.000,00	2.740.000,00	99,63	900.000,00
5.1.02.01.09	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	43.055.750,00	40.955.717,00	95,12	21.362.150,00
5.1.02.01.10	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Pesawat Kantor	35.825.100,00	35.788.000,00	99,89	9.982.000,00
5.1.02.01.11	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Lemris	18.707.500,00	18.964.303,00	101,37	13.842.000,00
5.1.02.01.12	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	199.045.000,00	166.340.718,00	83,57	84.980.785,00
5.1.02.01.13	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	31.200.000,00	3.868.550,00	12,40	7.843.000,00
5.1.02.01.14	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	10.826.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.648.956.716,00	1.608.633.240,00	97,51	2.022.315.553,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.548.259.000,00	1.511.815.524,00	97,58	1.890.890.873,00
5.1.02.02.02	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pemba	103.600.000,00	94.200.000,00	90,91	230.000.000,00
5.1.02.02.03	Honorarium Rohanawan	25.200.000,00	19.000.000,00	75,39	0,00
5.1.02.02.04	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pele	21.800.000,00	9.450.000,00	43,35	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Jasa Tenaga Perangas Prasarana dan Sarana Umum	167.700.000,00	167.700.000,00	100,00	55.900.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	384.800.000,00	384.800.000,00	100,00	328.900.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	111.800.000,00	111.800.000,00	100,00	279.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27.200.000,00	27.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	312.403.000,00	312.403.000,00	100,00	402.480.104,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	294.606.000,00	294.606.000,00	100,00	876.033.032,00
5.1.02.02.11	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	9.000.000,00	3.790.000,00	42,11	5.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Tagihan telepon	4.500.000,00	4.440.000,00	98,66	0,00
5.1.02.02.13	Belanja Tagihan Listrik	67.280.000,00	63.722.224,00	94,71	20.292.732,00
5.1.02.02.14	Belanja Langganan Surat/Buletin/Korrespondensi	720.000,00	0,00	0,00	17.625.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa/Fasilitas/Internet/TV Berlangganan	0,00	0,00	0,00	187.900.000,00
5.1.02.02.16	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.850.000,00	18.844.300,00	99,96	12.100.000,00
5.1.02.02.17	Belanja Juran Jaminan/Auransi	96.697.716,00	96.697.716,00	100,00	40.150.680,00
5.1.02.02.18	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	46.940.640,00	46.940.640,00	100,00	24.528.000,00
5.1.02.02.19	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.816.436,00	2.816.436,00	100,00	1.471.680,00
5.1.02.02.20	Belanja Juru Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	46.940.640,00	46.940.640,00	100,00	14.180.000,00
5.1.02.02.21	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.22	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempel/Meja	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.23	Belanja Jasa Konsultansi/Non Konsultasi	0,00	0,00	0,00	51.465.000,00
5.1.02.02.24	Belanja Jasa Konsultansi/Berorientasi Bidang/Telematika	0,00	0,00	0,00	15.065.000,00
5.1.02.02.25	Belanja Jasa Konsultansi/Berorientasi Bidang/Keperencanaan	0,00	0,00	0,00	36.400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	567.130.000,00	527.723.172,00	92,99	384.901.347,00

5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	425.930.000,00	391.534.375,00	91,92	196.254.998,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Ber	168.000.000,00	164.079.725,00	97,64	166.074.988,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Ka	30.000.000,00	8.960.000,00	29,87	0,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Ru	0,00	0,00	0,00	5.380.000,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Ru	12.000.000,00	12.093.900,00	100,78	14.770.000,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Ja	0,00	0,00	0,00	10.110.000,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralat	300.000.000,00	172.116.600,00	57,37	0,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	141.800.000,00	136.188.797,00	96,03	188.646.149,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Dengan Gedung 1	141.800.000,00	136.188.797,00	96,03	188.646.149,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.386.852.473,00	2.346.265.708,00	98,30	2.126.726.699,00
5.1.02.04.0	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.386.852.473,00	2.346.265.708,00	98,30	2.126.726.699,00
5.1.02.04.0	Belanja Perjalanan Dinas Biaya	1.777.950.473,00	1.761.789.998,00	99,09	1.582.010.560,00
5.1.02.04.0	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	323.528.000,00	306.280.910,00	94,63	365.776.819,00
5.1.02.04.0	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	285.374.000,00	278.194.800,00	97,50	338.579.320,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	13.070.748.941,00	14.146.701.251,00	93,88	13.136.740.347,00
5.2	BELANJA MODAL	453.868.500,00	431.254.825,00	95,01	169.727.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	453.868.500,00	431.254.825,00	95,01	169.727.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	7.260.000,00	7.200.000,00	99,17	35.000.000,00
5.2.02.01.0	Belanja Modal Alat Bantu	7.260.000,00	7.200.000,00	99,17	35.000.000,00
5.2.02.01.0	Belanja Modal Ponsel	7.260.000,00	7.200.000,00	99,17	0,00
5.2.02.01.0	Belanja Modal Mesin Baru	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.125.000,00	16.576.740,00	91,46	58.475.000,00
5.2.02.05.0	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	17.270.000,00
5.2.02.05.0	Belanja Modal Alat Reproduksi (Pengandaan)	0,00	0,00	0,00	17.270.000,00
5.2.02.05.0	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.125.000,00	16.576.740,00	91,46	41.205.000,00
5.2.02.05.0	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	16.555.000,00
5.2.02.05.0	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Dome Low)	18.125.000,00	16.576.740,00	91,46	34.450.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasar	183.575.500,00	173.445.542,00	94,47	0,00
5.2.02.06.0	Belanja Modal Alat Studio	183.575.500,00	173.445.542,00	94,47	0,00
5.2.02.06.0	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	101.925.000,00	100.876.500,00	98,97	0,00
5.2.02.06.0	Belanja Modal Peralatan Cetak	81.750.000,00	72.569.042,00	88,76	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	234.808.000,00	224.032.543,00	95,41	76.252.000,00
5.2.02.10.0	Belanja Modal Komputer Unit	210.000.000,00	199.392.543,00	94,94	48.400.000,00
5.2.02.10.0	Belanja Modal Personal Computer	90.000.000,00	83.780.000,00	93,10	48.400.000,00
5.2.02.10.0	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	120.000.000,00	115.602.543,00	96,33	0,00
5.2.02.10.0	Belanja Modal Peralatan Komputer	24.808.000,00	24.640.000,00	99,32	27.852.000,00
5.2.02.10.0	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	24.808.000,00	24.640.000,00	99,32	27.852.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.19.0	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.19.0	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	453.868.500,00	431.254.825,00	95,01	169.727.000,00
	JUMLAH BELANJA	13.524.617.441,00	14.577.956.076,00	93,81	13.306.467.347,00
	SURPLUS/DEFISIT	(15.534.617.441,00)	(14.579.956.076,00)	93,81	(13.796.467.347,00)



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DAFTAR PERSEDIAAN
31 Desember 2022

NO	Kode Akun	URAIAN	SALDO PERSEDIAAN PER 31 DES 2022	SALDO PERSEDIAAN PER 31 DES 2021
1		2	3	4
	1.1.12.01	BARANG PAKAI HABIS	6.381.695	2.178.180
	1.1.12.01.01	BAHAN	1.920.000	0
1	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	1.920.000	0
2	1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	0	0
3	-	Bahan Peledak	0	0
4	1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar Dan Pelumas	0	0
5	1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku	0	0
6	1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir	0	0
7	1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses	0	0
8	1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	0	0
9	1.1.12.01.01.0009	Istirahat Pemadam Kebakaran	0	0
10	1.1.12.01.01.0010	Istirahat Gas	0	0
11	1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0	0
12	1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	0	0
	1.1.12.01.02	SUKU CADANG	0	0
1	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	0	0
2	1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar	0	0
3	1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran	0	0
4	1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium	0	0
5	1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar	0	0
6	1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi	0	0
7	1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian	0	0
8	1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	0	0
9	-	Suku Cadang Alat Persenjataan	0	0
10	1.1.12.01.02.0010	Persediaan Dari Belanja Bantuan Sosial	0	0
11	1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	0	0
	1.1.12.01.03	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	3.461.695	2.178.180
1	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	0	54.780
2	1.1.12.01.03.0002	Kertas Dan Cover	0	0
3	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	0	187.400
4	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	0	0
5	1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0	0
6	1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	0	0
7	1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	0	0
8	1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	3.461.695	0
9	1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	0	0
10	1.1.12.01.03.0010	Kaportap Dan Perlengkapan Satwa	0	0
11	1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0	0
12	1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	0	1.936.000
13	1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0
	1.1.12.01.04	OBAT-OBATAN	0	0
1	1.1.12.01.04.0001	Obat	0	0
2	1.1.12.01.04.0002	Obat-Obatan Lainnya	0	0

NO	Kode Akun	URAIAN	SALDO PERSEDIAAN PER 31 DES 2022	SALDO PERSEDIAAN PER 31 DES 2021
	1.1.12.01.05	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	0	0
1	1.1.12.01.05.0001	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0
2	1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0	0
	1.1.12.01.06	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	0	0
1	1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0	0
2	1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	0	0
	1.1.12.01.07	NATURA DAN PAKAN	0	0
1	1.1.12.01.07.0001	Natura	0	0
2	1.1.12.01.07.0002	Pakan	0	0
3	1.1.12.01.07.0003	Natura Dan Pakan Lainnya	0	0
	1.1.12.01.08	PERSEDIAAN PENELITIAN	0	0
1	1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi	0	0
2	1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0	0
3	1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi	0	0
4	1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya	0	0
	1.1.12.01.09	PERSEDIAAN DALAM PROSES	0	0
1	1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses	0	0
2	1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0	0
	1.1.12.02	BARANG TAK HABIS PAKAI	0	0
	1.1.12.02.01	KOMPONEN	0	0
1	1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja	0	0
2	1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Pratekan	0	0
3	1.1.12.02.01.0003	Komponen Perabatan	0	0
4	1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu	0	0
5	1.1.12.02.01.0005	Attachment	0	0
6	1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya	0	0
	1.1.12.02.02	P I P A	0	0
1	1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (Dt)	0	0
2	1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (Acp)	0	0
3	1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja	0	0
4	1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan	0	0
5	1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass	0	0
6	1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik Pvc (Upvc)	0	0
7	1.1.12.02.02.0007	P I P A Lainnya	0	0
	1.1.12.03	BARANG BEKAS DIPAKAI	0	0
	1.1.12.03.01	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS LAINNYA	0	0
1	1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas	0	0
2	1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas	0	0
3	1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	0	0
		JUMLAH PERSEDIAAN	5.381.695	2.178.180

Diars Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DAFTAR SALDO PERSEDIAAN
 31 Desember 2022

Rincian Daftar Persediaan :

NO	Kode Akun	URAIAN	SATUAN	BARANG/PELENGKAPAN YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA KEGIATAN OPERASIONAL PEMERINTAH			BARANG/PELENGKAPAN YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES PRODUKSI (PEMERINTAH MEMPRODUKSI BENSERVI)			BARANG DALAM PROSES PRODUKSI YANG DIMAKSUDKAN UNTUK DUALAI ATAU DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT			BARANG YANG DISIMPAN UNTUK DUALAI ATAU DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA KEGIATAN PEMERINTAHAN			JUMLAH
				Jumlah Satuan	Harga (Rp)	Saldo Persediaan Akhir (Rp)	Jumlah Satuan	Harga (Rp)	Saldo Persediaan Akhir (Rp)	Jumlah Satuan	Harga (Rp)	Saldo Persediaan Akhir (Rp)	Jumlah Satuan	Harga (Rp)	Saldo Persediaan Akhir (Rp)	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10	11	12	13	14	15=13x14	16	
	5.1.12.01	BARANG PAKU HANG				1.401.888		0			0			0	1.401.888	
	5.1.12.01.01	BARANG				1.401.888		0			0			0	1.401.888	
1	5.1.12.01.01.0001	Bahan, Bangunan Dan Konstruksi	Unit	2	950.000	1.900.000		0			0			0	1.900.000	
	5.1.12.01.02	SURU CADANG				0		0			0			0	0	
	5.1.12.01.03	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR				3.461.888		0			0			0	3.461.888	
8	5.1.12.01.03.0005	Air Minum				3.461.888		0			0			0	3.461.888	
		Baterai AA 8 pcs	Unit	3	35.031,00	105.093		0			0			0	105.093	
		Baterai AA 8 pcs	Unit	1	29.497,40	29.497		0			0			0	29.497	
		Baterai AA 8 pcs	Unit	3	35.000,00	105.000		0			0			0	105.000	
		Baterai AA 8 pcs	Unit	1	29.000,00	29.000		0			0			0	29.000	
		Lampu Compact 20 Watt	Unit	3	60.360,00	180.960		0			0			0	180.960	
		Lampu Neon 40 Watt	Unit	3	35.733,15	107.199		0			0			0	107.199	
		Lampu Spot 30 Watt	Unit	3	460.004,30	1.380.013		0			0			0	1.380.013	
		Lampu Tornado 20 Watt	Unit	3	50.082,75	150.248		0			0			0	150.248	
		Over Sheler Broco	Unit	4	28.495,25	113.981		0			0			0	113.981	
		Seter Gergaj	Unit	2	49.454,00	98.908		0			0			0	98.908	
		Stop Kontak 4 Lubang	Unit	5	39.597,70	197.989		0			0			0	197.989	
		Stop Kontak Lubang 3 (Floor)	Unit	4	31.599,75	126.399		0			0			0	126.399	
		Stop Kontak 7	Unit	3	70.984,40	212.953		0			0			0	212.953	
		Lampu LED	Unit	11	99.000,00	1.089.000		0			0			0	1.089.000	
		JUMLAH PERSEDIAAN				3.381.888		0			0			0	3.381.888	

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

AGUNG PERMANA, S.Sos.
 NIP. 197501012008011007

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 DAFTAR MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
 31 Desember 2022

NO	AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO AWAL 2022 (Rp)	PENAMBAHAN						PEWILANGAN						SALDO AKHIR PER 31-Dec-2022 (Rp)	
			KORRISI	MUTASI MASUK	REKLASIFIKAS I	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	Hibah/Pengakuan Perorangan Lainnya yang Sah	JUMLAH	KORRISI	MUTASI KELUAR	REKLASIFIKAS II	PENGHAPUSAN N	Hibah/Pengakuan Perorangan Lainnya yang Sah	JUMLAH		
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15 = 10+11+12+13+14	16 = 3-9-15	
1	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	8.268.028.944	5.102.736			376.083.590		581.249.330							0	8.449.282.290,00
2	AKUMULASI PENYUSUTAN STRUKTUR DAN BANGUNAN	4.268.180.374	499			54.053.171		54.053.660	0						0	4.322.112.843,00
3	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, BENGKIS, DAN JEMBATAN	27.067.500	340			3.360.108		3.360.408							0	31.357.808,00
4	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	0				0		0							0	0,00
	JUMLAH	10.794.052.424,18	5.163.544	0	0	433.496.869,00	0	638.663.407	0	0	0	0	0	0	0	11.432.762.841,00
	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA					0		0							0	0
	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA	10.794.052.424,18	5.163.544	0	0	433.496.869,00	0	638.663.407	0	0	0	0	0	0	0	11.432.762.841,00

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTACI LARA, L.O. DAN TERATA
Daerah Kependudukan dan Pemerintahan Sipil
31.12.2022

Kode rekening LRA	URAIAN LRA	Kode Rekening LO	URAIAN LO	Belanja LRA TA 2022	REKAPITULASI		JUMLAH	REKONVANSI		JUMLAH	REKONVANSI	REKONVANSI
					REKAPITULASI	REKONVANSI		REKONVANSI	REKONVANSI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	REKONVANSI											
51.10.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	51.10.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.479.232.987	-	-	-	-	-	-	-	2.479.232.987
51.10.02	Belanja Tunjangan Peningkatan ASN	51.10.02	Belanja Tunjangan Peningkatan ASN	4.038.815.474	-	-	-	-	-	-	-	4.038.815.474
51.10.03	Tunjangan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan ASN	51.10.03	Tunjangan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan ASN	12.209.797	-	-	-	-	-	-	-	12.209.797
	JUMLAH			6.520.258.258								6.520.258.258
	REKONVANSI											
51.42.01.01	Belanja Penyelenggaraan Tanah	51.42.01.01	Belanja Penyelenggaraan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	181.394.505
51.42.01.02	Belanja Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman	51.42.01.02	Belanja Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman	591.534.519	-	-	-	-	-	-	-	591.534.519
51.42.01.03	Belanja Penyelenggaraan Gedung dan Bangunan	51.42.01.03	Belanja Penyelenggaraan Gedung dan Bangunan	34.283.767	-	-	-	100.000.000	1.800.000	124.900.000	21.282.767	346.486.136
	JUMLAH			935.818.295				100.000.000	1.800.000	124.900.000	21.282.767	963.801.068
	REKONVANSI											
	REKONVANSI											
51.02.14.01	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Bangunan	51.02.14.01	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Bangunan	2.345.205.798	-	-	-	-	-	-	-	2.345.205.798
	JUMLAH			2.345.205.798								2.345.205.798
	REKONVANSI											
	REKONVANSI											
51.99.00.00	REKONVANSI	51.99.00.00	REKONVANSI	-	5.000.000	2.575.000	11.500.000	-	-	-	-	18.075.000
	JUMLAH				5.000.000	2.575.000	11.500.000					18.075.000
	TOTAL			11.986.400.000	5.000.000	2.575.000	11.500.000	100.000.000	1.800.000	124.900.000	21.282.767	12.445.908.068



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL NERACA DAN LRA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PER 31 Desember 2022

NO	URAIAN	LRA	NERACA	SELISIH	KETERANGAN
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)
1	TANAH	-	-	-	
2	PERALATAN DAN MESIN	431.254.825,00	431.254.825,00	-	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	
5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	
7	ASET LAINNYA	-	-	-	
JUMLAH		431.254.825,00	431.254.825,00	-	

Mengetahui,

Pt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

II. INDRASTUTI CHANDRA DWI SUTRISNO, S.H., M.Si
 NIP. 196804041998032002

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

AGUNG PERMANA, S.Sos.
 NIP. 197501013008014507